



RENSTRA 2021 - 2026
PERUBAHAN



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) adalah gambaran arah kebijakan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2021-2026.

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK dan Isu Global yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal,

Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Fauziah, S.Pt

Pembina Tk. I

NIP. 19680205 199703 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	12
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	42
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.	72
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.	74
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	74
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	79
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga	86
3.4. Telaah Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	91
3.5. Telaah Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.	95
3.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	96
3.7. Penentuan Isu – Isu Strategis	102
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	108
4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah	108
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	113

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	118
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	119
BAB VIII. PENUTUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu dokumen Perencanaan strategis yang disusun secara rinci oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 Tahun, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam rencana Kerja OPD setiap tahun yang terintegritas melalui program dan kegiatan guna pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan prinsip kebutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan sektor perkebunan dan peternakan dituangkan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan sebelumnya. Kestinambungan penetapan sasaran pembangunan Perkebunan dan Peternakan merupakan penjabaran dari program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

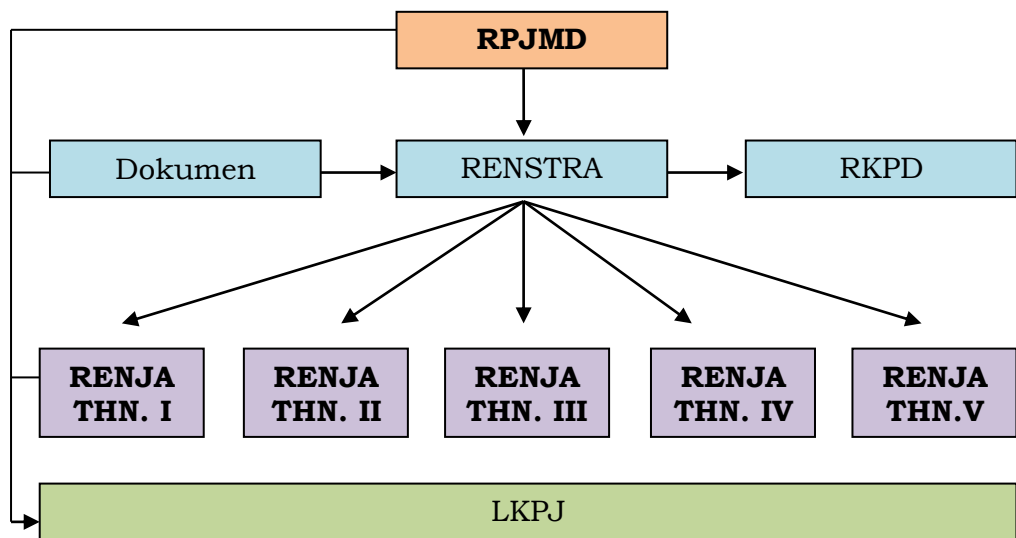
Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (***strengths***), kelemahan

(weakness), peluang (**opportunities**) dan ancaman (**threats**) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra Satuan Kerja merupakan Dokumen Perencanaan yang menjabarkan isu - isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan Pedoman Perencanaan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang

baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan

permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Oleh karenanya, landasan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

- 5) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat.
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah,

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
 - 28) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - 30) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud penyusunan Renstra (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 ini disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

b. Tujuan.

Tujuan penyusunan Renstra (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021- 2026;

3. Sebagai acuan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021–2026 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra K/L.
- 3.4. Telaah Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
- 3.5. Telaah Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
- 3.6. Telaah RTRW Tanjung Jabung Barat dan KLHS
- 3.7. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab IV mengenai Urusan Pemerintahan bagian kesatu pasal 9 ayat 1 dan 3 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintah Absolut, Urusan Pemerintah Konkuren dan Urusan Pemeritah Umum, pada ayat 3 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintah Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada bagian ketiga mengenai Urusan Pemerintah Konkuren pada pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2 meliputi 18 urusan sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 menyebutkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan.

Urusan Pemerintah Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas perkebunan dan Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kepala Seksi

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- c. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Perbenihan
 2. Seksi Produksi
 3. Seksi Perlindungan
- d. Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi.
 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi.
 2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin.
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Penyuluhan.
 2. Seksi Pengolahan.
 3. Seksi Pemasaran.
- g. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)**, terdiri dari :
1. UPT Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang perkebunan dan peternakan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
 - e. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) dan;

- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
 - b. Melaksanakan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya terkait lingkup tugas;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - f. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan bidang-bidang dan
 - g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan

- perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Subbagian Keuangan

Pasal 12

- 1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PERKEBUNAN

- (1) Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemberian bimbingan

teknis, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perkebunan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perbenihan perkebunan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul, bimbingan teknis perbenihan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana tanam dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya perkebunan dan bimbingan pasca panen serta pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyediaan dan pengawasan penggunaan benih, pengendalian dan pengamatan OPT, bimbingan kelembagaan OPT, penanggulangan bencana, pencegahan dan perlindungan perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perbenihan.

- (1) Seksi Perbenihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perbenihan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pengujian, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih, pengembangan vaeritas unggul pemberian bimbingan produksi benih, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup perbenihan perkebunan.

Seksi Perbenihan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan;
- b. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan Pengolahan di bidang Perkebunan;

- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan perkebunan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Produksi.

(1) Seksi Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, penyiapan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup produksi perkebunan.

Seksi Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan.
- c. Melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan.
- d. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan produksi perkebunan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Perlindungan

(1) Seksi Perlindungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengendalian, bimbingan teknis, pengamatan, pengolahan, penanggulangan bencana, pemberian rekomendasi pemantauan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian dilingkup perlindungan.

Seksi Perlindungan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi perlindungan;
- b. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih, bahan pengendalian OPT, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT serta pengolahan data OPT bidang Perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu serta bimbingan teknis perlindungan dan Pengolahan Perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam, gangguan kebakaran lahan dan kebun dan gangguan usaha perkebunan;

- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan perlindungan perkebunan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PETERNAKAN

- (1) Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan, pelaksanaan, perencanaan kebutuhan, pembinaan bimbingan, pengendalian penyakit, pengawasan peredaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan.

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang peternakan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian, penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT, pengujian benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan pemberdayaan kelompok peternak serta bimbingan produksi ternak;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon pengaduh ternak, penyusunan kawasan sentra produksi ternak dan kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, menyusun standart pola gaduhan ternak pemerintah, dan redistribusi ternak serta penilaaian ternak;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengawasan peredaran obat hewan, pemotongan hewan, penanggulangan penyakit zoonosis, penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembibitan dan Produksi

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi lingkup perbibitan dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pembibitan dan Produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak serta pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT), pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT dan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak dan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi Peternakan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak.

- (1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan kawasan ternak, penyiapan lokasi dan peternak, mengelola administrasi gaduhan ternak, penilaian ternak Pemerintah dan redistribusi ternak lingkup Pengembangan dan Penyebaran Ternak.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- b. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- c. Melakukan identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak;
- d. Melakukan penyusunan kawasan sentra produksi ternak, kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, penyusunan standart pola gaduhan ternak pemerintah dan mengkoordinasikan lokasi kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan bersama;
- e. Melakukan rencana sarana dukungan kerjasama dengan provinsi dan pusat dalam Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- f. Melaksanakan administrasi gaduhan ternak, pelaksanaan redistribusi ternak dan penilaian ternak pemerintah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan pendokumentasian kegiatan Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan peredaran obat hewan dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
- d. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan,

- bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan serta mengawasi pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan;
- e. Melakukan pengawasan menanggulangi penyakit Zoonosis dan melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PRASARANA DAN SARANA

1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang prasarana dan sarana;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan potensi, pengelolaan lahan, irigasi perkebunan dan peternakan;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, perhitungan penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan, peternakan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, tata cara usaha perkebunan dan peternakan, bantuan permodalan, rekomendasi perizinan perkebunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Lahan dan Irigasi

Seksi Lahan dan Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi lahan Perkebunan dan Peternakan;
- c. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan Perkebunan dan Peternakan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi Perkebunan dan peternakan; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penghitungan, pengawasan perendaran, penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran serta pemjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin serta dan peternakan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Perkebunan dan peternakan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pembiayaan dan Investasi.

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

bimbingan pendampingan dan supervisi, tatacara usaha, rekomendasi perizinan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan;

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;
- b. Melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembiayaan dan investasi, bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi serta fasilitasi pelayanan investasi perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan;
- d. Melakukan pemberian informasi dan rekomendasi tata cara usaha perkebunan dan peternakan dan bantuan permodalan di bidang perkebunan dan peternakan;
- e. Melaksanakan tata cara usaha, pemberian izin/rekomendasi teknis dibidang perkebunan dan peternakan;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan;

g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, pengolahan serta pemasaran perkebunan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rencana pembinaan dan pemberdayaan bagi penyuluhan, pekebunan dan peternakan, penyusunan jadwal penyuluhan, pembinaan lembaga petani, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis dan pengembangan unit pengolahan hasil, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi

- pangan olahan yang baik (CPPOB), pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan dan pengembangan Pemasaran hasil, promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar Perkebunan dan Peternakan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan

- (1) Seksi Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan pembinaan serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup penyuluhan perkebunan dan peternakan

Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;
- b. Melakukan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penyusunan rencana dan jadwal penyelenggaraan penyuluhan, penyiapan pelaksanaan penyebaran materi, metode penyuluhan dan bahan

- penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- d. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan supervisi penyuluhan perkebunan dan peternakan, pembinaan menumbuh kembangkan lembaga petani dan rencana pembinaan serta pemberdayaan bagi penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkebunan dan peternakan; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan.

- (1) Seksi Pengolahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan bimbingan dan pengembangan, penerapan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengolahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Perkebunan dan Peternakan;

- b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil, dan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang Perkebunan dan peternakan ;
- d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan di bidang Perkebunan dan peternakan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Pengolahan di bidang Perkebunan dan peternakan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pemasaran.

- (1) Seksi Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil di bidang Perkebunan dan peternakan.

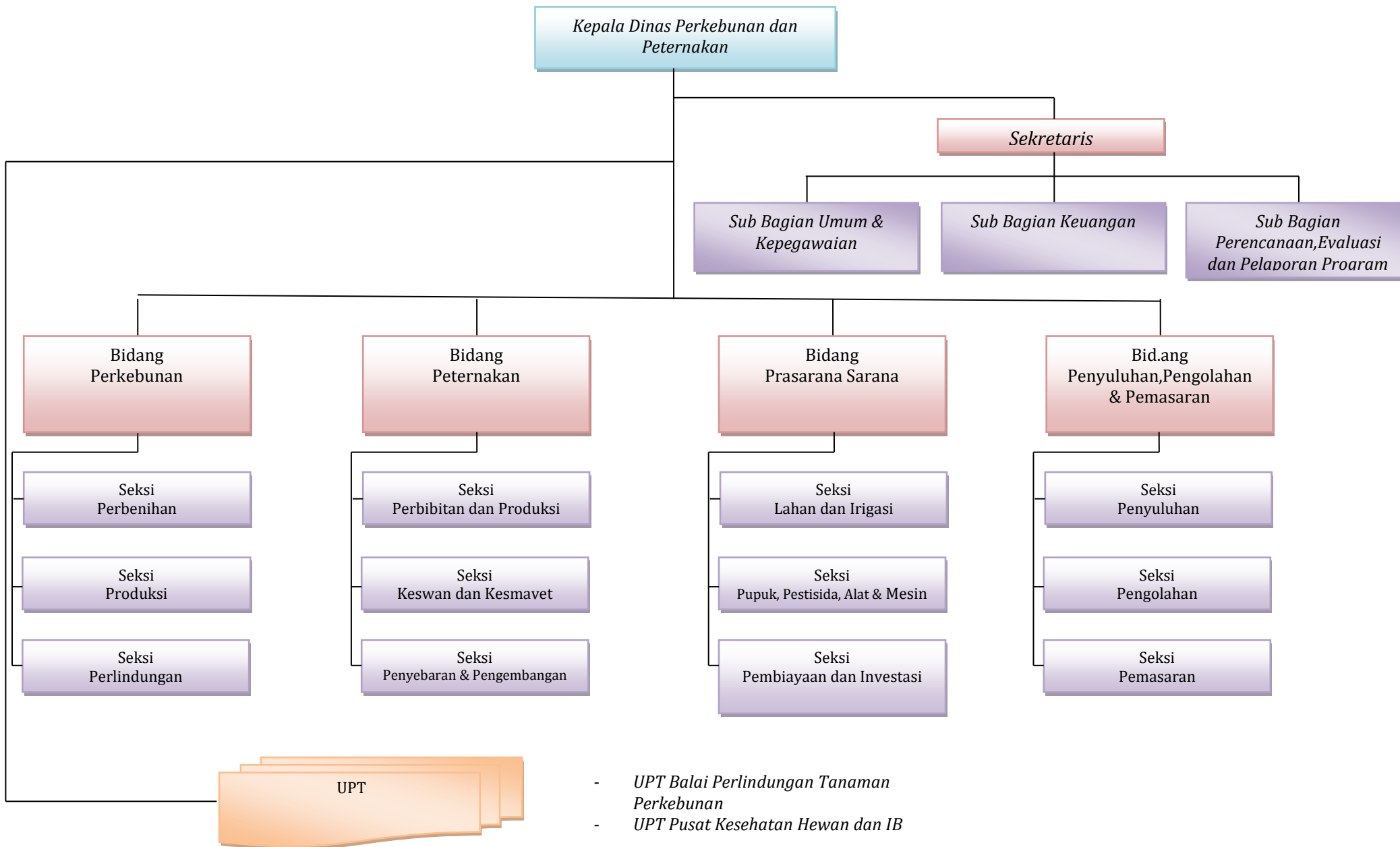
Seksi Pemasaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pemasaran;

- b. melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Pemasaran hasil Perkebunan dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan Pemasaran dan hasil Perkebunan peternakan, dan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;
- d. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang Perkebunan dan peternakan;
- e. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Perkebunan dan Peternakan ;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pemasaran di bidang Perkebunan dan peternakan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.



Dalam Rangka mendukung tugas pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitas. Selanjutnya Data SDM ASN Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Data ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Serta TKK Dinas Perkebunan dan Perkebunan Tahun 2020

No	Gol/Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan			
			SLTA	Diploma	S1	S2
1	IV/c	1	-	-	1	-
2	IV/b	2	-	-	2	-
3	IV/a	4	-	-	3	1
4	III/d	12	4	-	8	-
5	III/c	7	-	1	6	-
6	III/b	2	-	-	2	-
7	III/a	4	3	-	1	-
8	II/d	1	1	-	-	-
9	II/c	2	2	-	-	-
10	II/b	-	-	-	-	-
11	II/a	1	1	-	-	-
12	TKK/TKS	55	37	-	18	-
Jumlah total		91	48	1	41	1

Berdasarkan jabatannya, jumlah pegawai yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

1. Eselon II B (Kepala Dinas) : 1 Orang
2. Eselon III A (Sekretaris) : 1 Orang
3. Eselon III B (Kepala Bidang) : 4 Orang
4. Eselon IV A (Kasubbag/Kasi/Kepala UPT) : 17 Orang
5. Eselon IV B (Kasubbag UPT) : 2 Orang
6. Pelaksana : 12 Orang

Unit Pelayanan Teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan



Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan di Kecamatan Tungkal Ilir dan UPT Puskeswan dan IB diKecamatan Tungkal Ulu. Selain adanya UPT Dinas Perkebunan dan Peternakan juga mempunyai Pos Keswan dan IB.

Untuk pelayanan kesehatan hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (lima) pos keswan, 7 petugas Medis dan 7 petugas para medis yang tersebar di masing-masing Kecamatan.

**Jumlah Petugas Medis dan Paramedis
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Puskesmas	Wilayah Unit Kerja	Petugas Medis	Petugas Para Medis	KET
1	Tungkal Ilir	Kec. Tungkal Ilir Kec. Bram Itam Kec. Seberang Kota	2	1	Medis PNS, Para Medis Honorer.
2	Betara	Kec. Betara Kec. Kuala Betara	1	1	Medis PNS, Para Medis Honorer.
3	Pengabuan	Kec. Pengabuan Kec. Senyerang	1	1	Medis PNS, Para Medis Honorer.
4	Merlung	Kec. Merlung Kec. Muara Papalik Kec. Renah Mendaluh	1	2	Petugas Medis dan Para Medis Honorer.
5	Tungkal Ulu	Kec. Tungkal Ulu Kec. Batang Asam Kec. Tebing Tinggi	2	2	Petugas Medis dan Para Medis Honorer.

Dilihat dari jangkauan lokasi dan medan yang cukup berat jumlah petugas medis dan paramedis masih sangat minim. Untuk optimalnya masing-masing Kecamatan mempunyai 1 (satu) unit pos keswan dan 1 (satu) orang petugas medis dan dibantu 2 (dua) orang petugas paramedis.



Untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak salah satu usaha dengan program inseminasi buatan (IB) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak baik kualitas maupun kuantitas.

Jumlah Pos IB di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 9 unit dengan petugas IB sebanyak 14 orang, petugas PKB 12 orang dan petugas ATR 4 orang yang tersebar dimasing-masing Kecamatan. Namun karena adanya keterbatasan SDM sehingga Petugas IB merangkap juga sebagai Petugas PKB dan ATR seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Jumlah Petugas IB, PKB, ATR dan Recorder
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	KECAMATAN	PETUGAS IB	PETUGAS PKB	PETUGAS ATR	KET
1	TUNGKAL ILIR	1	1	-	-
2	BRAM ITAM	1	1	1	
3	SEBERANG KOTA	-	-	-	
4	BETARA	1	1	-	
5	KUALA BETARA	-	-	-	
6	PENGABUAN	1	1	-	PNS
7	SENYERANG	4	3	1	PNS IB 1 Org, PKB 1 org
8	TUNGKAL ULU	2	1	2	
9	TEBING TINGGI	1	3	-	
10	MUARA PAPALIK	1	1	-	
11	BATANG ASAM	1	-	-	
12	MERLUNG	1	1	-	
13	RENAH MENDALUH	-	-	-	
TOTAL		14	12	4	

Aset/Modal

Untuk Sarana dan Prasarana serta Perlengkapan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan *Desember 2020* sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel Aset/Modal Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Jenis Klasifikasi Aset		Saldo Per - 31 Desember 2020
I	ASET TETAP		10.674.436.473,14,-
	1	Tanah	962.978.500,-
	2	Peralatan dan Mesin	3.682.564.796,-
	3	Gedung dan Bangunan	4.957.300.318,14,-
	4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.071.592.859,-
	5	Konstruksi dalam Pengerjaan	
II	ASET TETAP LAINNYA		719.900.000,-
III	ASET LAINNYA		2.406.492.450,-
TOTAL ASET			13.800.828,923,14-

2.3. KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan

4. Harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang terkait dengan tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah pada misi ke-3 yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan.

Sebagai penjabaran Visi, Misi dan IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan produksi komoditi perkebunan
2. Meningkatkan populasi ternak

Untuk mencapai IKU tersebut maka selama Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan dan Peternakan memberikan bantuan-bantuan yang langsung menyentuh dan memberikan manfaat bagi petani pekebun/peternak melalui beberapa kegiatan yang menunjang dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut. Pencapaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel TC.23. Adapun beberapa Program dan Kegiatan yang langsung menyentuh untuk mendukung capaian IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat yaitu :

I. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia dan Sentra Peternakan

Kegiatan ini memberikan bantuan ternak sapi perkembangbiakan ke kelompok tani dari Tahun 2016-2020, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : Bantuan Ternak Sapi kepada kelompok tani

No	Tahun Penyebaran	Nama Kelompok Tani	Jumlah Bantuan (ekor)	Lokasi	Ket.
1	2018	BKAG Batang Asam	7	Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam	
		BKAG Tungkal Ulu	7	Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu	
		BKAG Tebing Tinggi	6	Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi	
2	2019	KT. Tani Makmur	25	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi	Hibah
		KT. Sido Makmur	25	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi	Hibah
		KT. Wono Mukti	25	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi	Hibah
		KT. Mekar Jaya	25	Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi	Hibah
		KT. Mekar Jaya	5	Desa Lubuk Bernai Kec. Batang Asam	Hibah
		KT. Maju Jaya	5	Desa Lubuk Bernai Kec. Batang Asam	Hibah
		KT. Tanjung Raya	5	Desa Lubuk Bernai Kec. Batang Asam	Hibah
		KT. Makmur Jaya	25	Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam	Hibah
		KT. Terpadu Sungai Tungkal	25	Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik	Hibah
		KT. Budi Doyo	15	Desa Bukit Bakar Kec. Renah Mendaluh	Hibah
		KT. Tunas Andalan	10	Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir	Hibah
		KT. Maju Bersama	10	Desa Suak Samin Kec. Pengabuan	Hibah
3	2020	Bumdes Karya Bersama	26	Desa Delima Kec. Tebing Tinggi	Hibah

		Bumdes Gerbang Nusantara	26	Desa Dataran Kempas Kec.Tebing Tinggi	Hibah
		Bumdes Mandiri Sejahtera	26	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi	Hibah
		KT. Sumber Makmur	10	Desa Lubuk Sebontan Kec. Muara Papalik	Hibah

2. Kegiatan Pengembangan Inseminasi Buatan

Untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sapi dilakukan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dari Tahun 2016-2020. Inseminasi buatan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

Tabel : Inseminasi buatan yang telah dilaksanakan

No	Tahun	Jumlah IB	Jumlah PKB	Kelahiran	Keterangan
1	2016	1.500 ekor	1.500 ekor	1.122 ekor	
2	2017	1.500 ekor	1.500 ekor	1.437 ekor	
3	2018	1.770 ekor	1.500 ekor	1.201 ekor	
4	2019	2.000 ekor	1.200 ekor	1.139 ekor	
5	2020	1.904 ekor	1.375 ekor	1.271 ekor	
JUMLAH		8.674 ekor	7.075 ekor	6.170 ekor	

3. Kegiatan Sinkronisasi Birahi

Kegiatan Sinkronisasi Birahi adalah kegiatan Inseminasi Buatan dengan perlakuan pemberian hormon penyerentak birahi yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan jumlah populasi ternak. Data sinkronisasi Tahun 2016-2020 sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

No	Tahun	Jumlah Ternak	Jumlah PKB	Kebuntingan	Ket
1	2016	500 ekor	500 ekor	265 ekor	
2	2017	500 ekor	500 ekor	348 ekor	
3	2018	500 ekor	500 ekor	322 ekor	
4	2019	500 ekor	500 ekor	322 ekor	
5	2020	500 ekor	500 ekor	440 ekor	

II. Program Penanganan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Untuk meningkatkan populasi ternak salah satunya dengan mengurangi angka kematian ternak. Adapun Kegiatan pengobatan ternak yang telah dilaksanakan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel : Kegiatan pengobatan ternak yang telah dilaksanakan

No	Tahun	Jumlah Pengobatan	Kematian	Keterangan
1	2016	1.000 ekor	7 ekor	APBD II
2	2017	1.000 ekor	79 ekor	
3	2018	1.500 ekor	146 ekor	
4	2019	1.500 ekor	49 ekor	
5	2020	1.500 ekor	43 ekor	
Jumlah		6.500 ekor	324 ekor	

III. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Untuk sektor perkebunan bantuan yang telah dilakukan untuk petani selama Tahun 2016-2020 melalui berbagai kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pembibitan Kelapa Sawit

Penyediaan bibit sawit unggul bersubsidi bagi petani menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tahun 2016-2020 telah dilaksanakan pengadaan kecambah kelapa sawit sebanyak 50.000 kecambah. Bibit kelapa sawit ini telah dijual kepada masyarakat/petani dengan harapan agar petani menanam bibit kelapa sawit yang unggul, bermutu dan bersertifikat yang nantinya dapat meningkatkan produksi kelapa sawit tersebut.

2. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu petani dalam melindungi kebun mereka dari organisme pengganggu tanaman (OPT) atau serangan hama dan penyakit tanaman dengan memberikan bantuan herbisida dan obat – obatan sesuai dengan anjuran teknis dalam pengendalian OPT sehingga tidak mengganggu produksi dari hasil kebun petani. Ada beberapa penyakit pada komoditi perkebunan yang telah ditangani seperti tercantum pada tabel berikut ini :

No.	Tahun	Jenis Hama dan Penyakit	Komoditi	Lokasi
1.	2018	- Jamur Akar Putih (JAP) - Penyakit Busuk Akar - Pengendalian Hama Kumbang Kelapa	Kopi Pinang Kelapa Dalam	Kec. Betara dan Bram Itam Kec. Senyerang Kec. Pengabuan
2.	2019	- Jamur Akar Putih (JAP) - Pengendalian Hama Kera - Pengendalian Hama Rayap	Kopi Kelapa Dalam, pinang dan kopi Kelapa Dalam, Pinang, Kelapa Sawit	Desa Mandala Jaya Kec. Betara Desa Bunga Tanjung Kec. Betara Desa Sungai Gebar Kec. Kuala Betara
3.	2020	- Pengendalian Hama Kumbang Kelapa - Pengendalian Hama Penggerek Buah Kopi - Pengendalian Jamur Akar Putih (JAP) - Pengendalian JAP	Kelapa Dalam Kopi Kopi Pinang	Desa Sungai Dualap, Sungai Gebar dan Kel. Betara Kiri Kec. Kuala Betara Kec. Betara Desa Bunga Tanjung, Kel. Mekar Jaya Kec. Betara Desa Sungai Terap Kec. Betara

3. Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat preventif dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Dari kegiatan ini telah terbentuk sebagai berikut :

- Tim Pengendalian, Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Tingkat Kabupaten sebanyak 15 (lima belas) anggota
- KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Betara, Kuala Betara dan Kecamatan Pengabuan

4. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi TAM

Kegiatan ini dilaksanakan untuk jaringan irigasi system Tata Air Mikro (TAM) pada lahan perkebunan seperti lahan kelapa dalam dan pinang. Bantuan pada kegiatan ini berupa Pipa Paralon yang membantu petani agar tata air pada lahan kebun mereka lancar yang nantinya akan membantu dalam peningkatan produksi hasil perkebunan. Adapun bantuan yang diberikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun	Jenis Bantuan	Lokasi
1.	2017	Pipa Paralon sebanyak 100 batang	Kec. Seb.Kota dan Bram Itam
2.	2018	Pipa Paralon sebanyak 100 batang	Kec. Kuala Betara, Seb.Kota dan Bram Itam
3.	2019	Pipa Paralon sebanyak 300 batang	Kec. Kuala Betara, Seb.Kota dan Bram Itam

5. Kegiatan Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom, Kelapa Sawit dan Kebun Entres

Pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa pemeliharaan kebun percontohan kopi libtukom seluas 1 Ha yang terletak di Desa Bunga Tanjung Kec. Betara, Pemeliharaan Kebun Percontohan

Kelapa Sawit dan Entres seluas 9 Ha yang terletak di Desa Tanjung Paku Kec. Merlung. Kegiatan ini bertujuan memberikan contoh teknis yang benar dalam pengembangan dan pemeliharaan Kebun Kopi Libtukom, Kebun Kelapa Sawit serta penyediaan mata entres Karet unggul bagi petani.

Dari kegiatan – kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini bantuan yang telah diberikan kepada kelompok tani seperti bantuan bibit, pupuk, obat-obatan, Alsintan/Sarana Prasarana dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok tani/Kelompok Wanita Tani dengan maksud agar bisa merubah pola perilaku petani dalam menyikapi bantuan yang diberikan pemerintah serta nantinya bisa menambah pendapatan petani serta bisa meningkatkan produksi hasil perkebunan .

Tabel : Bantuan bibit dan obat-obatan yang telah diberikan kepada kelompok tani

No	Tahun	Bantuan Bibit	Jumlah	Lokasi	Ket
1	2017	Bibit kopi Libtukom	10.500 btg	Desa Muntialo Kec. Betara	
2	2017	Pupuk Organik	26.250 kg	Desa Muntialo Kec. Betara	
3	2017	Bibit Pinang	500 btb	Desa Lumahan dan Parit Bilal	
4	2018	Kelapa dalam	500 btg	Desa Rantau Benar Kec. Renah Mendaluh dan Desa Penyabungan Kec. Merlung	
		Pupuk dan Obat- obatan			
5	2019	Pupuk tablet	5.000 kg	Kec. Betara, Bram Itam, Kuala Betara	
		Bibit pinang	500 btg		
		Pupuk NPK Mutiara	4.100 kg		
		Herbisida	20 Liter		
		Bibit kopi	12.300 btg		

6	2020	Pupuk Tablet	8.640 Kg	Kec. Bram Itam, Betara dan Kuala Betara	
	2020	Bibit Pinang, Pupuk NPK dan Herbisida	800 batang bibit, 200 Kg NPK dan Herbisida 20 liter	Desa Suak Labu Kec. Kuala Betara dan Desa Semau Kec. Bram Itam	

Tabel : Bantuan Pelatihan yang diberikan pada kelompok tani

No	Tahun	Jenis Pelatihan	Lokasi	Jumlah Peserta	Ket
1	2016	P2WKSS	-	50 orang	Pelatihan kepada kelompok tani ataupun kelompok wanita tani (KWT) merupakan bentuk pelatihan Dinamika Kelompok (DK)
2	2017	SKE	Seberang Kota, Tungal Ilir, Kuala Betara, Betara	125 orang	
3	2017	P2WKSS	Senyerang, Pengabuan	50 orang	
4	2018	SKE	Bram Itam, Kuala Betara, Tebing Tinggi	125 orang	
5	2018	P2WKSS	Renah Mendaluh	50 orang	
6	2019	SKE	Betara, Pengabuan, Tebing Tinggi, Kuala Betara	125 orang	
7	2019	P2WKSS	Tkl. Ilir, Seberang Kota	50 orang	
8	2020	SKE	Desa Sei. Gebar Barat Kec. Ka. Betara, Desa Kemuning Kec. Bram Itam	50 orang	

Tabel : Bantuan Sarana Prasarana pada kelompok tani

No	Tahun	Jenis Bantuan	Kelompok Tani/Lokasi	Jumlah Bantuan	Ket
1.	2016	Lantai Jemur	KT. Suka Makmur II/Parit Panglong Kel. Mekar Jaya Kec. Betara	40 kodi kapasitas 200 kg pinang basah/kodi seng	120 kodi
	2016	Lantai Jemur	KT. Martini Jaya/Desa Sungai Gebar Barat, Kec. Kuala Betara	20 kodi	
	2016	Lantai Jemur	KT. Bina Jaya/Desa Suak Labu Kec. Kuala Betara	20 kodi	

	2016	Lantai Jemur	KT. Rezeki Sakti/Parit Panting I RT. 10, Kel. Bram Itam Raya Kec. Bram Itam	15 kodi	
	2016	Lantai Jemur	KT. Suka Maju/Dusun Jati Mulyo Desa Jati Mas Kec. Bram Itam	25 kodi	
2.	2017	Lantai Jemur	KT. Kalpin Jaya/Desa Teluk Nilau Raya Kec. Seberang Kota	30 kodi	
	2017	Lantai Jemur	KT. Sumber Makmur/ Kel. Tungkal II, Kec. Tungkal Ilir	40 kodi	
	2017	Lantai Jemur	KT. Sido Dadi/ Desa Tanjung Pasir, Kec. Kuala Betara	15 kodi	
	2017	Lantai Jemur	KT. Sederhana/Desa Dataran Pinang, Kec.Kuala Betara	15 kodi	
	2017	Digester Biogas	KT. Mekar Jati/Desa Teluk Pulaui Raya Kec. Seberang Kota	1 unit	Peternakan
	2017	Mesin Pengupas Kopi Basah	KT. Mekar Tani/ Parit Lapis, Kel. Mekar Jaya, Kec. Betara	2 unit	
	2017	Mesin Pengupas Kopi Basah	KT. Suka Makmur I/ Parit panglong, Kel. Mekar Jaya, Kec. Betara	2 unit	
	2017	Mesin Pengupas Kopi Basah	Karya Pembangunan I/ Parit Lapis, Kel. Mekar Jaya, Kec. Betara	2 unit	
3.	2018	Mesin Chopper	KT. Sido Makmur/ Desa Purwodadi, Kec. Tebing Tinggi	1 unit	
	2018	Mesin Chopper	KT. Bumi Aji/ Desa Purwodadi, Kec. Tebing Tinggi	1 unit	
	2018	Lantai Jemur	KT. Karya Maju/ Desa Panting Gading, Kec. Bram Itam	25 kodi	100 kodi
	2018	Lantai Jemur	KT. Sri Mulyo/ Desa Sungai Dungun, Kec. Kuala Betara	25 kodi	
	2018	Lantai Jemur	KT. Maju Makmur I/Kel. Senyerang Kec. Senyerang	25 kodi	
2018	Lantai Jemur	KT. Mugo Mulyo/Desa Sungai Gebar Kec. Kuala Betara	25 kodi		

	2018	Mesin Pengupas Kopi Basah Mesin Pengupas Kopi Kering	KT. Embun Pasir/Desa Tanjung Pasir Kec. Kuala Betara	1 unit 1 unit	
4.	2019	Lantai Jemur	KT. Subur Makmur/Desa Tanjung Pasir Kec. Kuala Betara	25 kodi	100 kodi
	2019	Lantai Jemur	KT. Loh Jinawi/Kel. Senyerang Kec. Senyerang	24 kodi	
	2019	Lantai Jemur	KT. Sumber Rezeki/Desa Kelagian Kec. Tebing Tinggi	31 kodi	
	2019	Lantai Jemur	KT. Lampung Jaya II/Desa Pantai Gading KEc. Bram Itam	20 kodi	
	2019	Mesin Pengupas Kopi Basah Mesin Pengupas Kopi Kering	KT. Karya Lestari II/Desa Muntialo Kec. Betara	1 unit 1 unit	
	2019	Mesin Pengupas Kopi Basah Mesin Pengupas Kopi Kering	KT. Sederhana/Desa Dataran Pinang Kec. Kuala Betara	1 unit 1 unit	
5.	2020	Lantai Jemur	KT. Sido Makmur/Desa Sungai Gebar Barat, KEc. Kuala Betara	25 kodi seng	
	2020	Lantai Jemur	KT. Setia Kawan/Desa Sungai Gebar Barat Kec. Kuala Betara	25 kodi seng	
	2020	Lantai Jemur	KT. Rukun Sentosa/Desa Betara Kanan Kec. Kuala Betara	26 kodi seng	

Tabel : Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan Pada Kelompok Tani

No	Tahun	Nama Pelatihan	Lokasi	Jumlah Peserta	Ket
1.	2017	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair/Padat, silase dan UMB	Desa Adi Jaya Kec. Tebing Tinggi	25 orang	
	2017	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair/Padat, silase dan UMB	Kel. Senyerang Kec. Senyerang	25 orang	

	2017	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair/Padat, silase dan UMB	Kel. Senyerang Kec. Senyerang	25 orang	
2.	2018	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair/Padat, silase dan UMB	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi	25 orang	
	2018	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair/Padat, silase dan UMB	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi	25 orang	
3.	2019	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair/Padat, silase dan UMB	Desa Kelagian Kec. Tebing Tinggi	100 orang	

Data Statistik Perkebunan Tahun 2016 - 2020

TAHUN	KOMODITI	LUAS LAHAN (Ha)				PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha/Thn)	JUMLAH PETANI (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
2016	Kelapa sawit	17.641	46.289	-	63.930	140.442	3.034	23.116
	Kelapa dalam	5.564	40.259	8.912	54.735	50.412	1.252	21.138
	Karet	3.282	8.615	1.909	13.806	6.416	745	5.822
	Pinang	2.755	7.547	222	10.524	9.433	1.250	7.894
	Kopi	273	2.009	315	2.597	1.170	582	2.324
2017	Kelapa sawit	18.138	49.158	-	67.296	154.058	3.134	24.051
	Kelapa dalam	5.526	40.299	8.930	54.755	53.712	1.333	21.141
	Karet	1.940	6.648	923	9.511	4.597	691	4.633
	Pinang	2.793	7.611	228	10.632	9.958	1.308	7.914
	Kopi	286	2.000	324	2.610	1.079	540	2.337
2018	Kelapa sawit	19.162	50.164	-	69.326	151.892	3.028	24.462
	Kelapa dalam	5.816	40.487	8.799	55.102	53.343	1.318	21.195
	Karet	1.892	6.515	838	9.245	4.407	612	4.569
	Pinang	2.957	7.890	224	11.071	9.981	1.265	8.013
	Kopi	344	1.996	336	2.676	1.354	678	2.341
2019	Kelapa sawit	18.978	42.704	11.112	72.794	119.671	2.802	26.591
	Kelapa dalam	5.799	40.773	8.777	55.349	54.430	1.335	21.265
	Karet	1.701	6.274	639	8.614	4.422	705	4.511
	Pinang	3.019	8.111	223	11.353	10.274	1.267	8.151
	Kopi	364	1.994	337	2.695	1.171	587	2.366

TAHUN	KOMODITI	LUAS LAHAN (Ha)				PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha/Thn)	JUMLAH PETANI (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
2020	Kelapa sawit	19.055	42.828	11.112	72.995	119.501	2.790	26.602
	Kelapa dalam	5.678	40.941	8.775	55.394	54.999	1.343	21.292
	Karet	1.600	6.240	448	8.288	3.847	617	4.376
	Pinang	3.139	8.119	223	11.481	10.666	1.314	8.273
	Kopi	364	1.995	337	2.726	1.182	592	2.392

Ket: Data Tahun 2020 merupakan data Angka Sementara Tahun 2020

Data Statistik Peternakan Tahun 2016 – 2020

TAHUN	KOMODITI	POPULASI (Ekor)	PRODUKSI DAGING (Kg)
2016	Sapi	8.306	310.310
	Kerbau	680	9.218
	Kambing	40.728	52.882
	Domba	750	628
	Unggas	1.164.880	3.499.164
2017	Sapi	8.522	280.104
	Kerbau	699	16.460
	Kambing	46.221	42.365
	Domba	775	1.201
	Unggas	1.415.831	4.034.344
2018	Sapi	8.624	291.470
	Kerbau	709	15.802
	Kambing	47.388	43.212
	Domba	795	584
	Unggas	1.555.273	4.118.131
2019	Sapi	8.795	296.141
	Kerbau	722	15.966
	Kambing	47.174	49.885
	Domba	811	827
	Unggas	1.557.407	4.120.400
2020	Sapi	8.908	298.476
	Kerbau	729	16.130
	Kambing	47.271	50.030
	Domba	813	838
	Unggas	1.464.111	4.121.105

Berdasarkan data statistik perkebunan dan peternakan diatas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :																		
	- Sawit				131,068	136,535	139,267	142,051	144,893	140,442	154,058	151,892	119,671	119,501	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8
	- Karet				6,575	4,144	4,913	4,915	4,918	6,416	4,597	4,407	4,422	4,315	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9
	- Kelapa				50,837	56,941	58,080	59,241	60,428	50,412	53,712	53,343	54,430	55,095	1.0	0.9	9.2	0.9	0.9
	- Kopi				1,323	1,263	1,288	1,314	1,340	1,170	1,079	1,354	1,171	1,190	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
	- Pinang				9,426	11,432	11,662	11,895	12,133	9,433	9,958	9,981	10,274	10,578	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
2	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) :																		
	- Sapi				8,616	8,389	8,557	8,728	8,902	8,306	8,522	8,624	8,794	8,908	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	- Kerbau				675	717	740	771	780	680	699	709	723	729	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
	- Kambing				71,586	48,002	48,550	48,910	49,228	40,728	46,221	47,388	47,174	47,271	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9
	- Domba				750	790	816	845	865	750	775	795	811	813	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
	- Unggas				1,819,070	1,099,095	1,054,050	1,211,753	1,272,340	1,164,880	1,415,831	1,555,273	1,557,406	1,464,111	0.6	1.3	1.5	1.3	1.2

Pada komoditi kelapa sawit, tanaman kelapa sawit rakyat Tahun 2019 dan 2020 berdasarkan tahun tanam dan umur tanaman yang sudah melewati umur ekonomis 25 tahun dan produktivitas kurang dari 10 ton tbs/ha/tahun sudah harus diremajakan kembali. Oleh karena itu berdasarkan pendataan statistik perkebunan sebagian tanaman kelapa sawit itu sudah beralih dari tanaman menghasilkan (TM) ke tanaman tua/tanaman rusak (TT/TR). Sejalan dengan itu tentulah berdampak pada penurunan produksi serta produktivitas di tahun 2019 dan 2020.

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Perkebunan yang diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan dan berdasarkan Permentan No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat mulai melaksanakan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun pada Tahun 2017.

Dan sampai dengan Tahun 2020 telah keluar Rekomendasi Teknis sebanyak 14 (empat belas) dari Direktorat Jenderal Perkebunan dengan luasan 7.277,4027 Ha/2.616 KK sesuai dengan usulan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjab Barat dengan pendanaan yang bersumber dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Kedepannya dengan adanya kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun terhadap tanaman TT/TR Kelapa Sawit bisa meningkatkan hasil produksi kelapa sawit dan Percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan.

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2016 – 2020
 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.666.952	632.622.317	1.149.523.777	1.072.377.648	811.997.593	713.337.516	523.829.589	1.097.246.507	1.037.603.747	791.685.012	0,91	0,83	0,95	0,97	0,97	916.630.333	862.591.213
Penyediaan jasa surat menyurat	6.700.000	4.050.000	4.050.000	3.450.000	3.750.000	5.362.500	2.461.080	4.050.000	3.361.600	3.741.600	0,80	0,61	1	0,97	0,99	3.824.999	3.403.569
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.400.000	193.100.000	124.980.000	100.680.000	82.500.000	81.064.761	121.142.611	83.383.112	75.089.587	66.789.321	0,61	0,63	0,67	0,75	0,81	125.314.999	86.601.157
Penyediaan jasa administrasi keuangan	141.600.000	102.200.000	121.700.000	204.520.000	225.880.000	141.600.000	98.700.000	121.700.000	204.520.000	225.880.000	1,0	0,97	1,0	1,0	1,0	163.574.999	162.699.999
Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.363.302	19.737.067	20.047.067	22.084.258	32.011.267	22.362.302	19.737.067	20.047.067	22.084.258	32.011.267	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	23.469.914	23.469.914

Penyediaan alat tulis kantor	111.786.650	87.242.450	110.607.510	85.010.392	57.985.221	111.786.650	83.238.750	110.607.510	85.010.392	57.985.221	1,0	0,95	1,0	1,0	1,0	85.211.392	84.210.467
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.625.000	13.050.000	14.250.000	14.250.000	19.500.000	13.125.000	11.550.000	12.450.000	13.350.000	17.400.000	0,96	0,89	0,87	0,94	0,89	15.262.499	13.687.499
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.842.000	16.442.800	10.421.950	10.822.998	7.303.910	9.842.000	7.372.400	10.421.950	10.822.998	7.303.910	1,0	0,45	1,0	1,0	1,0	11.247.914	8.980.314
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.200.000	14.850.000	6.000.000	6.000.000	5.225.000	6.900.000	0,93	1,0	1,0	0,87	0,96	6.299.999	6.031.249
Penyediaan makanan dan minuman	28.200.000	10.800.000	27.720.000	25.560.000	12.880.000	23.035.000	3.140.000	19.010.000	18.140.000	10.880.000	0,82	0,29	0,69	0,71	1,0	19.239.999	12.792.499
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	302.250.000	180.000.000	709.747.250	600.000.000	362.987.195	290.309.303	170.487.681	709.576.868	599.999.912	362.793.693	0,96	0,95	1,0	1,0	0,99	463.183.610	460.714.538
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	461.229.246	473.000.000	637.438.875	426.250.000	396.940.700	428.989.279	397.195.340	590.170.510	310.952.186	372.381.023	0,93	0,84	0,93	0,73	0,94	483.407.393	417.674.764
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	21.375.000	-	28.295.700	-	-	21.185.000	-	26.488.000	-	-	0,99	-	0,94	12.417.675	11.918.250

Pengadaan peralatan gedung kantor	24.000.00 0	14.000.00 0	157.975.0 00	97.200.00 0	30.200.00 0	22.197.50 0	10.755.00 0	152.530.0 00	63.413.50 0	30.200.00 0	0,92	0,77	0,97	0,65	1,0	74.843.749	64.224.624
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	228.487.5 00	272.250.0 00	276.300.0 00	234.600.0 00	263.000.0 00	200.446.7 79	207.907.3 40	235.300.5 10	161.887.1 86	240.328.1 53	0,88	0,76	0,85	0,69	0,91	261.537.499	211.355.796
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	26.100.00 0	26.750.00 0	28.250.00 0	49.450.00 0	32.945.00 0	25.950.00 0	19.200.00 0	28.250.00 0	40.667.50 0	32.945.00 0	0,99	0,72	1,0	0,82	1,0	34.348.749	30.265.624
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	182.641.7 46	160.000.0 00	153.538.8 75	45.000.00 0	42.500.00 0	180.395.0 00	159.333.0 00	152.905.0 00	44.984.00 0	42.419.87 0	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	100.259.718	99.910.467
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.050.00 0	33.375.00 0	40.125.00 0	41.800.00 0	38.319.20 0	34.917.50 0	33.152.50 0	39.617.50 0	41.000.00 0	37.895.00 0	0,97	0,99	0,99	0,98	0,99	38.404.799	37.916.249
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	36.050.00 0	33.375.00 0	40.125.00 0	41.800.00 0	38.319.20 0	34.917.50 0	33.152.50 0	39.617.50 0	41.000.00 0	37.895.00 0	0,97	0,99	0,99	0,98	0,99	38.404.799	37.916.249
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	15.000.00 0	10.000.00 0	-	-	-	12.000.00 0	9.000.000	-	-	-	0,80	0,90	-	2.500.000	2.250.000
Pengembangan SDM	-	-	15.000.00 0	10.000.00 0	-	-	-	12.000.00 0	9.000.000	-	-	-	0,80	0,90	-	2.500.000	2.250.000

Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	196.531.500	92.000.000	68.250.000	47.550.000	47.925.000	181.931.500	77.709.000	68.250.000	45.075.000	20.325.000	0,93	0,84	1,0	0,95	0,42	63.931.249	52.839.749
Promosi atas hasil produksi perkebunan	196.531.500	92.000.000	68.250.000	47.550.000	47.925.000	181.931.500	77.709.000	68.250.000	45.075.000	20.325.000	0,93	0,84	1,0	0,95	0,42	63.931.249	52.839.749
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	290.740.000	375.160.000	304.245.000	310.200.000	152.561.300	272.201.000	346.996.000	296.620.000	304.765.000	150.136.300	0,94	0,92	0,97	0,98	0,98	285.541.574	274.629.324
Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan	290.740.000	375.160.000	304.245.000	310.200.000	152.561.300	272.201.000	346.996.000	296.620.000	304.765.000	150.136.300	0,94	0,92	0,97	0,98	0,98	285.541.574	274.629.324
Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan	1.518.736.150	1.604.165.000	2.210.174.650	1.571.778.909	879.743.050	1.333.282.660	1.430.983.900	1.967.798.567	1.430.511.148	803.194.900	0,88	0,89	0,89	0,91	0,91	1.566.465.401	1.408.122.128
Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	158.400.000	118.200.000	126.480.000	226.662.750	8.800.000	141.938.550	101.426.000	116.445.000	202.315.500	8.800.000	0,90	0,86	0,92	0,89	1,0	120.035.687	107.246.624
Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat	303.792.500	139.600.000	-	-	-	255.505.800	124.745.000	-	-	-	0,84	0,89	-	-	-	34.900.000	31.186.250

Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom	202.800.600	121.997.800	102.161.000	-	-	184.827.560	117.192.000	100.275.000	-	-	0,91	0,96	0,98	-	-	56.039.700	54.366.750
Pembibitan Kelapa Sawit	342.121.400	342.000.000	302.176.400	767.501.400	231.037.700	286.001.300	281.079.300	283.105.000	691.956.573	230.017.500	0,84	0,82	0,94	0,90	0,99	410.678.874	371.539.592
Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan	-	129.200.000	135.319.000	111.430.000	122.316.300	-	76.034.000	87.552.800	79.561.500	65.948.800	-	0,59	0,65	0,71	0,54	124.566.324	77.274.274
Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida	-	30.725.000	48.440.000	-	-	-	30.120.000	47.760.000	-	-	-	0,98	0,99	-	-	19.791.250	19.470.000
Pembinaan Lintas Sektoral	121.218.100	83.980.600	68.220.000	48.182.259	30.106.300	102.258.100	80.320.100	67.670.000	47.530.000	30.106.300	0,84	0,96	0,99	0,99	1,0	57.622.289	56.406.599
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	75.840.000	114.595.000	98.295.000	63.900.000	64.061.300	74.865.000	110.885.000	97.745.000	62.530.000	64.061.300	0,99	0,97	0,99	0,98	1,0	85.212.824	83.805.324
Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan	175.533.550	85.945.000	58.460.000	193.332.500	140.095.300	151.975.550	80.245.000	56.380.000	189.397.000	136.698.900	0,87	0,93	0,96	0,98	0,98	119.458.199	115.680.224

Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom, Kelapa Sawit dan Kebun Entres	139.030.000	231.425.000	186.268.250	160.770.000	283.326.150	135.910.800	226.000.000	179.368.250	157.220.575	267.562.100	0,98	0,98	0,96	0,98	0,94	215.447.349	207.537.730
Revitalisasi kebun Kopi Libtukom	-	142.797.500	825.710.000	-	-	-	140.682.500	695.607.517	-	-	-	0,99	0,84	-	-	242.126.875	209.072.504
Fasilitas Peremajaan kebun Kelapa Sawit	-	63.699.100	124.965.000	-	-	-	62.255.000	105.425.000	-	-	-	0,98	0,84	-	-	47.166.025	41.920.000
Pemeliharaan Demplot Kelapa Dalam	-	-	133.680.000	-	-	-	-	130.465.000	-	-	-	-	0,98	-	-	33.420.000	32.616.250
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	-	143.310.000	68.910.000	39.984.000	33.288.900	-	139.500.000	68.910.000	39.305.000	33.288.900	-	0,97	1,0	0,98	1,0	71.373.224	70.250.974
Pertemuan koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan	-	143.310.000	68.910.000	39.984.000	33.288.900	-	139.500.000	68.910.000	39.305.000	33.288.900	-	0,97	1,0	0,98	1,0	71.373.224	70.250.974

Program Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	556.249.9 95	583.717.9 75	555.561.9 30	493.748.7 50	483.139.2 33	554.071.0 00	564.753.0 00	518.340.0 00	454.816.7 00	474.836.2 80	1,00	0,97	0,93	0,92	0,98	529.041.971	503.186.494
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	461.599.9 95	502.367.9 75	473.361.9 30	461.048.7 50	433.939.2 33	460.591.0 00	483.418.0 00	444.840.0 00	422.116.7 00	425.636.2 80	1,00	0,96	0,94	0,92	0,98	467.679.471	444.002.744
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	94.650.0 0	81.350.0 0	82.200.0 0	32.700.0 0	49.200.0 0	93.480.0 0	81.335.0 0	73.500.0 0	32.700.0 0	49.200.0 0	0,99	1,00	0,89	1,0	1,0	61.362.499	59.183.749
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	868.640.0 00	808.605.0 00	1.114.991. 030	3.779.485. 871	2.060.769. 100	813.778.8 00	740.184.4 20	1.035.809. 644	3.442.572. 758	1.747.116. 325	0,94	0,92	0,93	0,91	0,85	1.940.962.74 9	1.741.420.78 6
pemeliharaan ternak sapi bakalan	245.580.0 00	-	-	191.026.3 00	87.755.00 0	233.608.8 00	-	-	184.631.8 00	75.705.00 0	0,95	-	-	0,97	0,98	69.695.325	65.084.200
Lomba agribisnis peternakan	-	62.205.00 0	42.735.00 0	-	-	-	62.145.00 0	42.615.00 0	-	-	-	1,00	1,00	-	-	26.235.000	26.190.000
Pengembangan Inseminasi Buatan	343.165.0 00	465.900.0 00	376.988.0 00	230.646.5 00	353.235.0 00	327.315.0 00	433.461.0 00	336.175.9 08	222.023.5 22	326.400.0 00	0,95	0,93	0,89	0,96	0,92	356.692.374	329.515.107
Penyangga Hari Besar Keagamaan	123.050.0 00	137.100.0 00	195.100.0 00	201.469.0 00	121.639.0 00	122.150.0 00	130.956.0 00	186.325.0 00	179.329.0 00	114.889.0 00	0,99	0,96	0,96	0,89	0,94	163.826.999	152.874.749

Pusat Pengembangan Itik Daerah	-	143.400.000	214.569.000	-	-	-	113.622.420	200.900.000	-	-	-	0,79	0,94	-	-	89.492.250	78.630.605
Pengembangan ternak ruminansia dan sentra peternakan	156.845.000	-	218.869.030	3.119.274.071	1.476.218.800	130.705.000	-	207.588.736	2.819.668.436	1.208.681.025	0,83	-	0,95	0,90	0,82	1.203.590.475	1.058.984.549
Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif	-	-	66.730.000	37.070.000	21.921.300	-	-	62.205.000	36.920.000	21.441.300	-	-	0,93	0,996	0,98	31.430.325	30.141.575
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	120.264.600	53.409.000	36.479.000	28.099.000	-	118.514.600	47.692.000	34.479.000	28.099.000	-	0,99	0,89	0,95	1,0	-	29.496.749	27.567.499
Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	120.264.600	53.409.000	36.479.000	28.099.000	-	118.514.600	47.692.000	34.479.000	28.099.000	-	0,99	0,89	0,95	1,0	-	29.496.749	27.567.499
Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	159.220.000	314.939.550	308.361.346	269.761.745	242.645.200	122.800.000	302.567.550	259.591.346	232.133.662	160.149.200	0,77	0,96	0,84	0,86	0,66	283.926.959	238.610.439
Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan	-	61.550.000	45.150.000	32.055.000	33.716.300	-	61.303.000	40.000.000	32.055.000	33.716.300	-	0,996	0,89	1,0	1,0	43.117.824	41.768.574

Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	-	95.174.550	78.477.346	67.073.662	42.995.300	-	93.004.550	78.477.346	66.093.662	42.995.300	-	0,98	1,0	0,99	1,0	70.930.214	70.142.714
Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	159.220.000	158.215.000	184.734.000	170.633.083	165.933.600	122.800.000	148.260.000	141.114.000	133.985.000	83.437.600	0,77	0,94	0,76	0,79	0,50	169.878.920	126.699.149
Program Pengembangan Data/Informasi	595.507.000	582.620.000	558.509.450	409.719.750	346.237.500	580.152.940	558.495.000	519.963.541	392.169.000	325.843.500	0,97	0,96	0,93	0,96	0,94	474.271.674	449.117.759
Pengolahan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan	218.537.000	131.630.000	123.745.000	152.055.000	50.009.900	209.442.700	129.080.000	116.285.000	147.830.000	50.009.900	0,96	0,98	0,94	0,97	1,0	114.359.974	110.801.224
Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan Peternakan dan Pelaporan	113.630.000	89.990.000	66.140.000	27.680.000	37.740.000	108.955.240	88.305.000	66.140.000	26.142.000	37.740.000	0,96	0,98	1,0	0,94	1,0	55.387.499	54.581.749
Pengelolaan Ternak Pemerintah	143.800.000	157.800.000	173.555.700	118.550.000	153.266.300	143.800.000	157.550.000	155.469.791	115.470.000	134.872.300	1,0	1,0	0,90	0,97	0,88	150.792.999	140.840.522
Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan/Perkebunan	119.540.000	203.200.000	195.068.750	111.434.750	105.221.300	117.955.000	183.560.000	182.068.750	102.727.000	103.221.300	0,99	0,90	0,93	0,92	0,98	153.731.199	142.894.262

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Untuk penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan **Bidang Perkebunan** dan **Peternakan** memiliki beberapa **tantangan** sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktivitas komoditi perkebunan dan Peternakan dibandingkan dengan produktivitas nasional.
2. Rendahnya mutu hasil olahan/industri perkebunan yang menyebabkan rendahnya harga tawar akan produk komoditi perkebunan.
3. Tingkat SDM pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang relatif rendah dan kurang terampil menjadikan produk perkebunan kurang memiliki daya saing di pasar domestik dan regional.
4. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan dan peternakan.
5. Masih perlunya pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman dan gangguan usaha perkebunan.
6. Meningkatnya permintaan akan produk ternak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kesejahteraan dan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Kondisi Perekonomian Global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

8. Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesehatan ternak sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak.
9. Kurangnya Tenaga Medis dan Paramedis (SDM Teknis).

Adapun **peluang** yang akan mendukung pengembangan pelayanan yang akan dilakukan di **Bidang Perkebunan dan Peternakan** yaitu :

1. Letak strategis, berbatasan dengan pulau Batam, Negara Singapura dan Malaysia serta berbatasan secara inter regional (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Indragiri Hilir-Provinsi Riau).
2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.
3. Terbukanya lapangan kerja dibidang perkebunan.
4. Tumbuhnya investasi tanaman perkebunan dan industry.
5. Potensi untuk Integrasi ternak dilahan perkebunan.
6. Pemasaran produk peternakan dan perkebunan berdekatan dengan Pasar Bebas (Ekspor).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016–2021 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh petani, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.



Pada subsektor peternakan, populasi 5 (lima) jenis ternak (sapi, kerbau, kambing, ayam buras dan itik) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari kelima jenis ternak tersebut ternak sapi lebih menjadi komoditas prioritas dalam pembangunan program pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan asal hewani. Namun sejauh ini peternakan domestik belum mampu memenuhi permintaan daging dalam negeri, timpangnya antara pasokan dan permintaan ternayata masih tinggi.

Pada subsektor perkebunan terdapat 5 (lima) komoditi unggulan perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang dan kopi. Dilihat dari peranan (kontribusi) sektor pertanian, sektor perkebunan memegang peranan yang cukup besar dalam menambah besaran PDRB dan perkembangan pembangunan perekonomian khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan luasan. Namun diakhir tahun 2019 dan tahun 2020 sudah ada tanaman kelapa sawit yang kondisinya TT/TR atau produksinya kurang dari 10 ton tbs/ha sudah melaksanakan Replanting sesuai dengan Rekomendasi Teknis yang terbit dari Dirjenbun. Selain itu komoditi pinang juga mengalami peningkatan luasan dan produksi. Namun berbeda dengan komoditi karet dan kopi yang mengalami penurunan atau perkembangan yang tidak signifikan dikarenakan faktor harga yang rendah menjadi penyebab utama rendahnya minat petani untuk terus berkebun karet dan kopi.

Sedangkan untuk komoditas kelapa dalam tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yang cukup signifikan. Kondisi saat ini tanaman kelapa dalam yang ada adalah merupakan tanaman warisan keluarga atau nenek moyang yang mana tanaman tua/tanaman rusaknya cukup luas sehingga tidak produktif lagi dan perlu dilakukannya peremajaan terhadap tanaman kelapa dalam yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas dapat kami uraikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di **Bidang Perkebunan dan Peternakan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu :

- (1) Masih banyaknya tanggul – tanggul yang rusak di lahan perkebunan.
- (2) Sumber Daya Manusia Pekebun yang rendah dan kelembagaan petani pekebun yang belum optimal.
- (3) Masih seringnya terjadi serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan
- (4) Kurangnya tenaga medis dan paramedis
- (5) Jumlah Sapi betina indukan (sapi betina produktif) yang masih kurang.
- (6) Kualitas pakan ternak yang belum memenuhi pakan berkualitas.
- (7) Masih adanya serangan penyakit hewan menular
- (8) Kurangnya SDM/Petugas Teknis di Dinas/OPD

Dari aspek teknis untuk sektor perkebunan rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Kebun dengan kondisi tanaman tua dan rusak (TT/TR) yang cukup luas, terutama lagi pada tanaman kelapa dalam.
2. Belum optimalnya penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat.

3. Belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar.
4. Belum terpenuhinya standar sarana produksi lainnya.
5. Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan.
6. Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan
7. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang masih rendah.
8. Terbatasnya SDM Petani dan Petugas Lapangan
9. Perubahan Iklim.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Bidang Peternakan.</u>					
Jumlah populasi ternak.	Populasi ternak (ekor): - Sapi : 9.021 - Kerbau : 741 - Kambing : 47.757 - Domba : 819 - Unggas : 2.026.946	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 1,2 % per tahun	a. Masih rendahnya SDM peternak b. Masih tingginya kematian pedet (anak sapi) c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya tenaga medis dan paramedic e. Minimnya ketersediaan HPT Unggul	a. Masih adanya pemotongan betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas c. Minimnya anggaran	a. Minimnya sarana dan prasarana b. SDM pegawai rendah (belum memahami tugas dan fungsi) c. Kurangnya pegawai
<u>Bidang Perkebunan.</u>					
Produktivitas Komoditi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan : - Kelapa Sawit : 1.5% - Kelapa Dalam : 0.7% - Kopi : 0.3 % - Pinang : 0.9% - Karet : 0.3%	Produksi Komoditi Perkebunan tahun sekarang dibagi Produksi Komoditi Perkebunan tahun lalu (%)	a. SDM Petugas Perkebunan rendah b. Minimnya sarana dan prasarana c. Ketersediaan bibit d. Banyak tanaman tua/tanaman rusak e. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan	a. Perubahan Iklim b. Bencana alam/ Banjir c. Minimnya anggaran	a. SDM pegawai rendah (belum memahami tugas dan fungsi) b. Kurangnya pegawai c. Kurangnya SDM Teknis d. Pengetahuan SDM Perkebunan

3.2. Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 -2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu dan diselaraskan dengan **Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026**.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2021 - 2026 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu “ **Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024** ” yaitu :

No.	Visi	Penjabaran
1.	Berkualitas	Sumber Daya Manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
2.	Ekonomi Maju	Meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3.	Religius	Berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
4.	Kompetitif	Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan

5.	Aman	sumberdaya unggulan daerah. Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
6.	Harmonis	Terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026** sebagai berikut :

Kode	Misi
Misi 1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak
Misi 2	Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis
Misi 3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public
Misi 4	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Misi 5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada Misi Ketiga dan Misi Keempat. Adapun **Misi Ketiga** yaitu **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik**, dan **Misi Keempat**, yaitu **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**.

Langkah - langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan *prioritas* pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar sektor Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sektor Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi program/kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Program – program yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian

Dalam melaksanakan program – program tersebut diatas dapat kami sampaikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “ Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024 (Berkualitas,Ekonomi Maju, Religius,Kompetitif,Aman, dan Harmonis)”				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		BIDANG SEKRETARIAT		
	<p>Misi 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program ini yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pelayanan administrasi umum, administrasi keuangan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM Aparatur - Minimnya sarana dan prasarana pelayanan - Masih ada aparatur yang belum memahami tugas dan fungsi - Kinerja ASN masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman Aparatur terkait tugas dan fungsi ASN - Kedisiplinan rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan untuk memberikan arahan dan bimbingan
		BIDANG PETERNAKAN		
	<p>Misi 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program ini yaitu meningkatkan populasi ternak. Untuk populasi sapi dengan cara Inseminasi Buatan, Sinkronisasi Birahi dan melalui pengadaan ternak ruminansia besar, kecil dan unggas serta kegiatan penyediaan hijauan pakan ternak unggul, pengawasan kelompok ternak untuk mendukung kesejahteraan petani peternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga medis dan paramedis - Kurangnya pegawai (ASN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya pemotongan betina produktif 2. Minimnya ketersediaan indukan ternak 3. Masih tingginya penyakit hewan menular 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas tampung wilayah untuk ternak masih tinggi 2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik 3. Permintaan daging ke luar daerah tinggi

	<p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan ternak antar daerah, pelayanan pengobatan ternak, pemeriksaan specimen, PKB, Vaksinasi, Eliminasi, pengobatan hewan kesayangan, ketersediaan peralatan medic veteriner, dokumen lalu lintas ternak dan koordinasi dengan pelaku usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana pelayanan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor peternakan 5. Ketersediaan pakan yang berkualitas masih rendah 6. Kurangnya akses peternak untuk mendapatkan modal 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI 5. Kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa (Daerah Transit) 6. Sumber daya Pakan melimpah 7. Integrasi tanaman dan ternak
	<p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Untuk Mendukung Program tersebut bidang Perkebunan melaksanakan kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap pendukung sarana perkebunan dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa bantuan saprodi serta tetap melaksanakan pemeliharaan kebun percontohan kopi libtukom dan kelapa sawit serta pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa dalam, pinang dan kopi.</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Untuk Mendukung Program tersebut bidang Perkebunan dan Sarana Prasarana melaksanakan kegiatan pendataan tanggul - tanggul rusak dilahan perkebunan, perbaikan tata air mikro (TAM) serta Pembangunan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dilahan Ex. Entres Karet. Adapun bantuan yang diberikan kepada kelompok tani dapat berupa alsintan, rumah kompos dan saprodi seperti seng gelombang plastik, pipa</p>	BIDANG PERKEBUNAN		
		<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM Petugas Teknis Perkebunan rendah 2. Minimnya Sarana dan prasarana pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan b. Kurangnya SDM perkebunan c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan d. Adanya kerusakan tanggul - tanggul dilahan perkebunan sehingga menyebabkan penurunan produktivitas e. Masih sering terjadinya banjir yang menyebabkan kebun terendam dan mati 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang sangat memungkinkan untuk Perkebunan b. Keterbukaan akses transportasi darat yang semakin meningkat untuk arus lalulintas perkebunan c. Posisi Kab. Tanjab Barat yang strategis , terutama setelah dibuka Akses melalui Pelabuhan Roro d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yang masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat

	<p>paralon,chopper,alat pengupas kopi basah dan kering, jalan produksi perkebunan dan rumah kompoks bagi petani pekebun untuk peningkatan mutu hasil produksi</p> <p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>Untuk mendukung Program tersebut bidang Perkebunan melaksanakan kegiatan Pengendalian OPT baik secara kimia dan hayati serta Pengendalian, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Kebun dalam rangka untuk mengurangi gangguan usaha perkebunan dan upaya peningkatan produksi.</p> <p>Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <p>Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut perlu didukung dengan kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang membantu petani dalam melegalkan jenis usaha perkebunan yang dilakukan oleh petani pekebun sesuai dengan komoditas yang diusahakannya.</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan seperti peningkatan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan untuk menambah wawasan petani dan kelompok tani</p>		<p>f. Kurangnya ketersediaan bibit komoditi perkebunan yang unggul dan bersertifikat</p>	<p>e. Dukungan dana APBD I, APBN dan BPDPKS</p>
--	---	--	--	---

Selain itu untuk pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-B. 35 dibawah ini.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Pokok Daerah	Permasalahan OPD	Akar Masalah
1	Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 10,26 %.	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana - Minimnya bibit yang bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sumber daya manusia - Banyaknya tanggul yang rusak
2	Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah. Tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjung Jabung Barat masih tergolong rendah yaitu sebesar 67,54.	<ul style="list-style-type: none"> - Serangan OPT tinggi - Ketersediaan indukan produktif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Seringnya banjir sehingga kebun terendam - Tidak ada peremajaan tanaman TT/TR untuk kelapa dalam - Pengelolaan kebun masih budaya warisan
3	Prevalensi stunting Kab. Tanjung Jabung Barat menempati posisi tertinggi dibanding dengan kab/kota dalam Prov. Jambi yaitu 43,99%. Angka ini diatas angka prevalensi stunting nasional dan Provinsi Jambi. Kondisi Prevalensi Stunting terakhir pada tahun 2020 menurun menjadi 21,81 % namun masih masuk kategori tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kematian pedet (anak sapi) masih tinggi - Kurangnya petugas medis dan paramedis - Kurangnya pegawai - Masih ada pegawai yang belum memahami tugas dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya petugas teknis di lapangan

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional tersebut, dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan Pertanian maka Kementerian Pertanian RI menetapkan Visi sebagai berikut :

**“PERTANIAN YANG MAJU, MANDIRI DAN MODERN
UNTUK TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG
BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.**

Selain itu untuk mendukung **Misi** Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Pertanian RI **mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing** melalui Misi Kementerian Pertanian RI yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian maka ditetapkan *Tujuan Pembangunan Pertanian periode 2020 - 2024* yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan	
T1	Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
T2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
T3	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Pertanian tersebut maka ditetapkan Sasaran Strategis dan **Indikator Kinerja Utama** Kementerian Pertanian yang ingin dicapai dalam Periode 2020 - 2024 adalah :

- SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja :
 1. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
- SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja :
 2. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
 3. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan
- SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja :
 4. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
 5. persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan
- SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja :
 6. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
 7. teknologi yang diterapkan oleh pertanian
- SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja :
 1. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
 9. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
- SS6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

- pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja :
10. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
 11. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
 12. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
- SS7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :
13. persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani
 14. persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
- SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :
15. nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
- SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :
16. nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
- b. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- c. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian
- d. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
- e. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan, maka program-program Kementerian Pertanian Tahun 2020- 2024 sesuai dengan kewenangannya dirumuskan sebagai berikut :

No.	Program	Sasaran Program
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 2. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian 2. Meningkatnya kualitas pengawasan internal 3. Meningkatnya maturitas SPIP
3.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan 3. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan 4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan
4.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan komoditas strategis hortikultura 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian 3. Penyediaan sarana hortikultura sesuai kebutuhan 4. Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura

5.	Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan	1. Meningkatnya Pertumbuhan produksi dan ekspor produk perkebunan nasional. 2. Menurunnya impor produk perkebunan nasional.
6.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak 4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan
7.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan
8.	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1. Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian
9.	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelambagaan pertanian
10.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri 2. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan 3. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar 4. Meningkatnya konsumsi sayur, buah dan daging
11.	Peningkatan Kualitas Pengkaraman dan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1. Peningkatan daya saing pertanian (Ekspor) 2. Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati 3. Terkendalinyapenyebaran HPHK pada hewan 4. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien
12.	Pendidikan Pertanian	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada Sektor Perkebunan dan Peternakan Tahun 2020-2024 adalah:

1	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2 Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	1,30	1,35	1,40	1,45	2,00
		3 Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	4 Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	%	80,00	83,50	87,00	90,00	93,00
		5 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	6 Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	%	65,00	70,00	70,00	75,00	75,00
		7 Teknologi yang diterapkan oleh petani	%	70,00	74,00	78,00	82,00	85,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
5 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	8 Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	Indeks	62,55	63,10	63,56	64,05	64,55
	9 Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	Indeks	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92
6 Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	10 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	58,45	58,71	59,34	60,53	62,56
	11 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	78,90	79,50	80,10	80,80	81,60
	12 Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	13 Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00
	14 Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
8 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	15 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,96	80,71	81,46	82,21	82,96
9 Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	16 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,23	91,61	91,98	92,36	92,73

3.4 Telaah Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan.

Misi I : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan :

- Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Sasaran :

- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

Strategi :

- Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD

Arah Kebijakan :

- Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien
- Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
- Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan professional

Misi II : Memantapkan Perekonomian masyarakat dan daerah

Tujuan :

- Meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan

Sasaran :

- Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Strategi :

- Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun

Arah Kebijakan :

- Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
- Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
- Terwujudnya fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- Terwujudnya sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
- Terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan Kawasan
- Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik.
- Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan Lingkungan
- Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing
- Mendorong peningkatan kontribusi sub sektor perkebunan bagi pemerintah daerah
- Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan perkebunan.

Misi III : Memantapkan Kualitas SDM

Tujuan :

- Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparaturnya maupun petani, dan kelembagaan.

Sasaran :

- Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan.

Strategi :

- Peningkatan kompetensi petugas / petani dan kelembagaan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan.

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun social
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perkebunan dan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Jambi serta memperhatikan RPJPD

dan RPJMD Provinsi Jambi, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan tanaman perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026 adalah sebagai berikut:

a. Program Utama :

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian.

b. Program Pendukung:

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program pendukung sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

3.5 Telaah Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026 Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tujuan dan sasaran yang mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi.

Tujuan :

- Memulihkan Perekonomian Daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan
- Memulihkan Perekonomian Daerah melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

- Populasi Ternak (Sapi dan Kambing) dan Produksi Daging (Sapi, Kambing dan Unggas)
- Tersedianya/Terpenuhiya kebutuhan pangan daerah
- Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan luas panen cabe dan bawang merah
- Terpenuhiya kebutuhan prasarana pertanian untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura strategis
- Produk unggulan provinsi Jambi, Petani dan Pelaku Usaha
- Ternak (sapi, kerbau,kambing,babi,unggas) dan HPR (Hewan Pembawa Rabies (anjing, kucing dan kera) serta Unit Usaha Asal Hewan

3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Perkebunan Peternakan. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi Peternakan secara optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (**RTRW**) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Paragraf (2) Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 36 yang berisikan :

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan
 - b. kawasan hortikultura
 - c. kawasan perkebunan dan
 - d. kawasan peternakan
- (2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pengembangan sentra peternakan sapi berada tersebar di Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Pengembangan sentra peternakan komoditas unggas berada tersebar di Kecamatan Bram Itam
 - c. Kawasan pengembangan ternak terintegrasi dengan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
- (3) Bagian ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang pasal 68.

- (4) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- (a) Penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
 - (b) Pengembangan sentra bibit unggul
 - (c) Pengembangan sentra pengolahan pakan ternak
 - (d) Pengembangan pengolahan hasil peternakan
 - (e) Pengembangan pengolahan kotoran ternak
 - (f) Peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging dan
 - (g) Peningkatan sarana dan prasarana peternakan
- (5) Bagian Kedua ketentuan Umum Peraturan Zonasi pasal 110 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dalam pasal 95 ayat (3) huruf b meliputi :
- 1. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - 2. Kawasan peruntukan hortikultura;
 - 3. Kawasan peruntukan perkebunan dan
 - 4. Kawasan peruntukan peternakan
- (7) Pasal 114 berisikan :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan pemukiman masyarakat.
 - b. Ketentuan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai

dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
BIDANG PETERNAKAN				
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tata ruang untuk kawasan peternakan sapi di Kecamatan Batang Asam, Bram Itam, Ma. Papalik, Merlung dan Tebing Tinggi • Rencana Tata Ruang untuk ternak unggas Kecamatan Bram Itam • Kawasan Integrasi ternak dan perkebunan 	Usaha Peternakan menggunakan lahan kosong jauh dari pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya SDM peternak untuk mematuhi peraturan-peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan akan daging terus meningkat
BIDANG PERKEBUNAN				
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tata Ruang Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Peternakan di Kec.Tungkal Ulu, Merlung, Ma.Papalik, Tebing Tinggi, Batang Asam • Road Map Pengembangan Perkebunan Tanjung Jabung Barat 	Perkebunan sawit dilahan gambut	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Geografis yang memadai dalam pengembangan jenis perkebunan lainnya • Kondisi Geografis yang strategis dan adanya Pelabuhan Roro yang merupakan Lalu Lintas Perdagangan Internasional. • Terbuka peluang Kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui dana APBN

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KHLs beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KHLs Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
BIDANG PETERNAKAN				
•	<ul style="list-style-type: none"> • Digestasi kotoran hewan untuk menghasilkan CH₄ sebagai biogas • Peningkatan penggunaan kotoran hewan untuk pupuk 	Kurangnya pegawai teknis	Kurangnya SDM peternak dalam penggunaan TTG	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas tampung untuk ternak masih tinggi • Letak Kab. Tanjab Barat yang strategis untuk akses pasar
BIDANG PERKEBUNAN				
•	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang Pengembangan Desa/Kawasan Sentra Agrobisnis yg mengabungkan Perkebunan dan Peternakan • Penentuan Kawasan Perkebunan Induk 	Kurangnya ketersediaan SDM, sarana dan prasarana pendukung	Pengetahuan Petani dalam memahami pengembangan sector Agrobisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Kawasan Perkebunan yang cukup baik dalam pembentukan kawasan Agroindustri dan Kawasan Perkebunan Induk

Namun berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap kualitas, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013-2023, yaitu sebesar 68,12 % (dikategorikan kurang baik/buruk) maka direkomendasikan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013-2023 perlu dilakukan revisi.

Proses revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013-2023 saat ini sedang dilakukan, adapun beberapa perubahan struktur dan pola ruang yang diperhatikan antara lain untuk sektor perkebunan yaitu dari sebelumnya 4 (empat) kecamatan yaitu Kec. Pengabuan, Kec. Senyerang, Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Kuala Betara sebagai wilayah dengan potensi produksi kelapa dalam, sekarang berubah menjadi 6 (enam) kecamatan yaitu menambah 2 (dua) kecamatan : Kec. Bram Itam dan Kec. Seberang Kota.

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi Pertanian Jangka Menengah 2020 – 2024 yakni Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam penjabaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2005 – 2025 dalam Visi dan Misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024). Dan untuk mewujudkan Visi Presiden tersebut maka melalui Misi yang

dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita I yaitu untuk mendukung mewujudkan **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing** yang diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana sektor **Perkebunan dan Peternakan** merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional, dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sesuai dengan Nawacita Kedua Visi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan memilih *kedaulatan pangan asal ternak* pemilihan kedaulatan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dengan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Perkebunan Indonesia yang *Produktif, bernilai tambah dan berdaya saing* dalam mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mendukung tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang peternakan diperlukan langkah-

langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan Perkebunan dan Peternakan terutama untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dan peternakan. Dalam menjalankan tugas pokok fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menghadapi permasalahan antara lain :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
- 2) Minimnya Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana
- 3) Belum adanya regulasi (Perda) di bidang perkebunan dan peternakan
- 4) Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal
- 5) Kurangnya tenaga medis dan paramedis
- 6) Kurangnya modal petani, sehingga selalu tergantung dengan bantuan pemerintah
- 7) Produktifitas komoditi perkebunan dan produksi peternakan yang belum optimal
- 8) Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas
- 9) Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan
- 10) Masih adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit hewan menular serta gangguan usaha perkebunan.
- 11) Masih sering terjadinya banjir yang mengakibatkan kebun masyarakat terendam dan mati

- 12) Masih adanya kerusakan tanggul disekitar lahan perkebunan (sementara tanggul merupakan leading sektor Dinas PUPR)
- 13) Kurang tersedianya benih/bibit komoditi perkebunan yang berkualitas dan jelas asal usulnya (bersertifikat)
- 14) Kurangnya indukan ternak sebagai akseptor untuk mendukung Inseminasi Buatan

Dalam situasi dan kondisi tersebut diatas pembangunan sektor perkebunan dan peternakan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu 1). Potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2). Banyaknya penduduk/masyarakat yang bergantung pada sektor ini, 3). Peluang pasar yang sangat terbuka dan 4). Berpotensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi **Isu - Isu Strategis** antara lain :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

I. Kekuatan (strenghts):

1. Tersedianya Sumberdaya manusia;
2. Tersedianya sumberdaya lahan;
3. Tersedianya teknologi Informasi;
4. Tersedianya komoditas tanaman perkebunan dan peternakan untuk pemenuhan pangan;
5. Tersedianya peraturan per Undang-undangan;
6. Tersedianya norma, standar, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan.

II. Kelemahan (weakness):

1. Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan dan budidaya peternakan yang belum optimal;
2. Infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan dan Peternakan yang belum memadai;
3. Kurangnya ketersediaan indukan dan bibit ternak sebagai akseptor IB.
4. Kurangnya ketersediaan bibit unggul komoditi perkebunan yang bersertifikat.
5. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal.
6. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah.
7. Manajemen usaha tani (yang berwawasan agribisnis) belum dilaksanakan secara optimal sehingga rendahnya tingkat pendapatan petani kebun dan peternak.
8. Masih kurangnya penerapan pupuk yang sesuai dengan spesifikasi local

b. Faktor External

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

I. Peluang (opportunities):

1. Potensi sumberdaya tanaman perkebunan dan populasi ternak masih dapat ditingkatkan.
2. Adanya permintaan pasar domestik dan luar negeri
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif.
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan hewan
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah

II. Tantangan (threats):

1. Produksi/produktivitas tanaman perkebunan masih rendah
2. Alih fungsi lahan karet setiap tahun terus meningkat
3. Pengusaan teknologi perkebunan dan peternakan masih rendah
4. Isu lingkungan hidup dan globalisasi
5. Daya saing produk olahan perkebunan dan peternakan serta pemasaran masih terbatas
6. Kontribusi sektor perkebunan dan peternakan terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan rancangan awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian Misi ketiga dari RPJMD Kabupaten yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Misi keempat dari RPJMD Kabupaten yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan dan peternakan berbasis sumber daya alam lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;

2. Sasaran

Dengan mengacu tujuan diatas maka sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Meningkatnya produksi komoditi perkebunan secara optimal;
2. Meningkatnya populasi ternak;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor perkebunan dan peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :						
			- Kelapa Sawit	121.136	123.074	125.166	127.419	129.840	132.437
			- Karet	3.833	3.848	3.867	3.890	3.913	3.936
			- Kelapa dalam	55.050	55.490	55.989	56.549	57.171	57.800
			- Kopi	1.189	1.194	1.200	1.207	1.215	1.224
		- Pinang	10.557	10.663	10.780	10.909	11.039	11.182	
		2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) :						
			- Sapi	9.086	9.267	9.452	9.641	9.833	10.029
			- Kerbau	744	758	773	788	803	819
			- Kambing	48.216	49.180	50.163	51.166	52.189	53.232
- Domba	829		845	861	878	895	912		
- Unggas	1.493.393	1.523.260	1.553.260	1.584.799	1.616.494	1.648.823			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69.60	69.80	69.90	70.10	70.20	70.30
			Nilai IKM Perangkat Daerah	80.25	80.30	80.35	80.40	80.45	80.50

Dari indikator kinerja jumlah produksi komoditi perkebunan (ton) dapat kita tetapkan peningkatan produktivitas Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020*)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit (%)	1.3 %	1.5%	1.6%	1.7%	1.8%	1.9%	2%	2%
	Peningkatan Produktivitas Karet (%)	0.1 %	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
	Peningkatan Produktivitas Kelapa Dalam (%)	0.7 %	0.7%	0.8%	0.9%	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%
	Peningkatan Produktivitas Kopi (%)	0.1 %	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%
	Peningkatan Produktivitas Pinang (%)	0.8 %	0.9%	1.0%	1.1%	1.2%	1.2%	1.3%	1.3%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

I. Strategi

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan petani/pekebun.
3. Peningkatan Populasi dan Produksi ternak secara optimal.

II. Kebijakan.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. **Kebijakan Umum** Dinas Perkebunan dan Peternakan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien.
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
5. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan.
6. Terwujudnya fasilitas pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
7. Mendorong penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di jajaran Domestik dan Internasional
9. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang baik

10. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan – bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil produksi
11. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat
12. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Inseminasi Buatan
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
14. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas
15. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan
16. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,** dan **Kebijakan,** dapat dilihat pada **Tabel 5.1** berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021 – 2026

VISI : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”			
(BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS)			
MISI 4 : “ Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ”.			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi sub sector perkebunan dan peternakan berbasis sumber daya alam lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	Meningkatkan produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun/petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan 2. Meningkatkan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan 3. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan 4. Terwujudnya fasilitas pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 5. Mendorong penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan 6. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di jalaran Domestik dan Internasional 7. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang baik 8. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan – bantuan

	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan populasi dan produksi ternak secara optimal	<p>alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil produksi</p> <p>9. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.</p> <p>1. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Inseminasi Buatan</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan</p> <p>3. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas</p> <p>4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan</p> <p>5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan</p>
--	---------------------------------	---	---

MISI 3 : “ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ”.

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	<p>1. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan</p> <p>2. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan** pada Dinas Perkebunan telah menyesuaikan dengan **Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2021 – 2026** sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian **Tujuan** dan **Sasaran RPJMD**, dapat dilihat pada Tabel 6.1. dibawah ini, yaitu :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1. Terselenggaranya tata kelola Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	6,436,626,180	100%	7,815,733,039	100%	9,022,680,995	100%	10,377,583,144	100%	11,929,293,116	100%	13,713,241,885	100%	59,409,043,883	Disbunak	Tanjung Jabung Barat		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, DPA, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja dan Lakip	87 Dokumen	13 Dokumen	159,111,611	13 Dokumen	159,929,400	13 Dokumen	194,815,280	13 Dokumen	224,037,572	13 Dokumen	257,877,020	13 Dokumen	292,873,587	76 Dokumen	1,288,644,470				
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42 dokumen	8 dokumen	41,604,311	8 dokumen	41,680,500	8 dokumen	51,734,111	8 dokumen	59,494,228	8 dokumen	68,652,174	8 dokumen	75,806,539	48 dokumen	338,971,863				Tanjung Jabung Barat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	2 Laporan	37,895,708	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	2 Laporan	37,895,708				Tanjung Jabung Barat
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	3 Laporan	79,611,592	5 Laporan	118,248,900	5 Laporan	143,081,169	5 Laporan	164,543,344	5 Laporan	189,224,846	5 Laporan	217,067,048	28 Laporan	911,776,899				Tanjung Jabung Barat
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	5 laporan	1 laporan	5,094,292,865	1 laporan	5,786,004,137	1 laporan	6,798,817,511	1 laporan	7,818,640,137	1 laporan	8,991,436,158	1 laporan	10,340,151,582	6 laporan	44,829,342,391	Disbunak			Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	185 orang	42 orang/bulan	4,921,632,865	42 orang/bulan	5,561,445,137	42 orang/bulan	6,506,890,811	42 orang/bulan	7,482,924,432	42 orang/bulan	8,605,363,097	42 orang/bulan	9,896,167,562	252 orang/bulan	42,974,423,905				Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 orang	1 dokumen	172,660,000	1 dokumen	224,559,000	1 dokumen	291,926,700	1 dokumen	335,715,705	1 dokumen	386,073,061	1 dokumen	443,984,020	6 dokumen	1,854,918,486				Tanjung Jabung Barat
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	37 Kartu Inventaris	-	-	40 Kartu Inventaris	100,660,000	45 Kartu Inventaris	110,726,000	50 Kartu Inventaris	127,334,900	55 Kartu Inventaris	146,435,135	60 Kartu Inventaris	168,400,405	60 Kartu Inventaris	653,556,440	Disbunak			Tanjung Jabung Barat
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	-	-	1 laporan	100,660,000	1 laporan	110,726,000	1 laporan	127,334,900	1 laporan	146,435,135	1 laporan	168,400,405	5 laporan	653,556,440				Tanjung Jabung Barat
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN	100%	100%	38,319,200	100%	40,320,800	100%	48,384,960	100%	55,642,704	100%	63,989,110	100%	73,587,476	100%	320,244,250	Disbunak			Tanjung Jabung Barat
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	1 paket	38,319,200	1 paket	40,320,800	1 paket	48,384,960	1 paket	55,642,704	1 paket	63,989,110	1 paket	73,587,476	6 paket	320,244,250				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	100%	643,548,082	100%	790,645,144	100%	920,364,074	100%	1,059,918,685	100%	1,222,935,042	100%	1,408,535,298	100%	6,045,946,326				
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	7,667,331	1 paket	8,817,431	1 paket	10,580,917	1 paket	12,168,054	1 paket	13,993,262	1 paket	16,092,252	6 paket	69,319,247				Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	66,097,510	1 paket	76,012,137	1 paket	95,299,644	1 paket	109,594,590	1 paket	128,262,333	1 paket	147,501,683	6 paket	622,767,896				Tanjung Jabung Barat
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	26,880,000	1 paket	30,912,000	1 paket	37,094,400	1 paket	42,658,560	1 paket	49,057,344	1 paket	56,415,946	6 paket	243,018,250				Tanjung Jabung Barat			
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	24,406,241	1 paket	28,067,177	1 paket	32,277,254	1 paket	37,118,842	1 paket	42,686,668	1 paket	49,089,668	6 paket	213,645,850				Tanjung Jabung Barat			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	7,200,000	1 dokumen	8,280,000	1 dokumen	9,522,000	1 dokumen	10,950,300	1 dokumen	12,592,845	1 dokumen	14,481,772	5 dokumen	63,026,917				Tanjung Jabung Barat			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	511,297,000	1 laporan	613,556,400	1 laporan	705,589,860	1 laporan	811,428,339	1 laporan	933,142,590	1 laporan	1,073,113,978	6 laporan	4,648,128,167				Tanjung Jabung Barat			

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	36,000,000	1 dokumen	43,200,000	1 dokumen	51,840,000	5 dokumen	186,040,000		Tanjung Jabung Barat	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemda	100%	-	-	100%	113,700,600	100%	113,885,525	100%	130,968,354	100%	135,668,278	100%	153,776,720	100%	761,884,902	Disbunak	Tanjung Jabung Barat	
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2 unit laptop, 3 unit printer, 1 unit scanner, 1 unit PC dan 1 unit genset	108,700,500	2 unit AC, 3 unit printer, 1 unit PC	99,635,525	3 unit laptop, 2 unit printer	114,580,854	3 unit printer	116,822,653	2 unit laptop, 2 unit printer	132,104,252	6 unit laptop, 12 unit printer, 2 AC, 1 unit PC, 2 unit scanner	671,479,309			
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	3 unit lemari arsip, 1 kursi tunggu tamu, 1 unit infocus, 1 unit microphone wireless, 95 m2 stker dinding kaca	5,000,000	10 unit kursi stainless untuk aula	8 unit meja kerja	14,250,000	3 unit kursi kantor dinas, 2 unit kursi kantor UPT	16,387,500	1 unit kursi tunggu tamu	18,845,625	2 unit lemari arsip	21,672,469	10 unit kursi stainless untuk aula, 4 unit meja kerja, 3 unit kursi kantor dinas, 2 unit kursi kantor UPT, 1 unit kursi tunggu tamu, 2 unit lemari	90,405,594		
			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	100%	100%	218,518,000	100%	261,643,200	100%	370,309,840	100%	425,856,316	100%	489,734,763	100%	554,725,119	100%	2,320,787,239	Disbunak	Tanjung Jabung Barat	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	4,798,000	1 laporan	5,517,700	1 laporan	6,621,240	1 laporan	7,614,426	1 laporan	8,756,590	1 laporan	10,070,078	6 laporan	43,378,034		Tanjung Jabung Barat	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	83,820,000	1 laporan	106,740,500	1 laporan	128,088,600	1 laporan	147,301,890	1 laporan	169,397,174	1 laporan	186,336,891	6 laporan	821,685,054		Tanjung Jabung Barat	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	129,900,000	1 laporan	149,385,000	1 laporan	235,600,000	1 laporan	270,940,000	1 laporan	311,581,000	1 laporan	358,318,150	6 laporan	1,455,724,150		Tanjung Jabung Barat	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda	100%	100%	282,836,422	100%	562,829,857	100%	465,377,805	100%	535,184,476	100%	621,217,610	100%	721,191,697	100%	3,188,637,866	Tanjung Jabung Barat		
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 unit	26 unit	106,350,000	26 unit	121,860,000	26 unit	166,825,000	26 unit	191,848,750	26 unit	226,381,525	26 unit	267,130,200	26 unit	1,080,395,475		Tanjung Jabung Barat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	138,448,300	25 unit	148,180,000	25 unit	192,634,000	25 unit	221,529,100	25 unit	254,758,465	25 unit	292,972,235	25 unit	1,248,522,100			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	32 unit	28,538,200	55 unit	28,936,000	55 unit	36,170,000	55 unit	41,595,500	55 unit	47,834,825	55 unit	55,010,049	55 unit	238,084,574			
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit dinas, 2 unit UPT	1 unit dinas	9,499,922	1 unit dinas, 2 unit UPT	263,853,857	1 unit dinas, 2 unit UPT, parkir kendaraan dinas	69,748,805	1 unit dinas, 2 unit UPT	80,211,126	1 unit dinas, 2 unit UPT	92,242,795	1 unit dinas, 2 unit UPT	106,079,214	1 unit dinas, 2 unit UPT	621,635,718			

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	1. Meningkatkan produksi komoditi perkebunan 2. Meningkatkan Populasi Ternak	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%) 2. Angka Kebuntingan Sapi yang di Inseminasi Buatan (IB)	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,3%, karet = 0,1%, kelapa dalam = 0,7%, kopi = 0,1% pinang = 0,8% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 70 %	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,5%, karet = 0,3%, kelapa dalam = 0,7%, kopi = 0,3% pinang = 0,3% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 70 %	1.429.373.696		1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,6%, karet = 0,4%, kelapa dalam = 0,8%, kopi = 0,4% pinang = 1,0% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 71 %	6.428.722.275	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,7%, karet = 0,5%, kelapa dalam = 0,9%, kopi = 0,5% pinang = 1,1% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 72 %	7.360.620.090	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,8%, karet = 0,6%, kelapa dalam = 1,0%, kopi = 0,6% pinang = 1,2% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 74 %	8.429.061.525	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,9%, karet = 0,6%, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinang = 1,2% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 74 %	9.654.204.018	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 2%, karet = 0,6%, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinang = 1,3% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 75 %	11.059.196.210	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 2%, karet = 0,6%, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinang = 1,3% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 76 %	44.361.177.814	Disbunak	Kab. Tanjab Barat	
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pendukung perkebunan	100 %	-	-	100 %	648.210.520	100 %	713.031.572	100 %	784.334.729	100 %	862.768.202	100 %	949.045.022	100 %	3.957.390.046	Disbunak	Kab. Tanjab Barat
					Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 laporan	-	-	1 laporan	648.210.520	1 laporan	713.031.572	1 laporan	784.334.729	1 laporan	862.768.202	1 laporan	949.045.022	6 laporan	3.957.390.046	Disbunak	Kec. Tungkal Ilir, Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Pengabuan dan Kuala Betara
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penjaminan kemurnian kelestarian, pemanfaatan dan kualitas SDG Hewan/Tanaman	100 %	100 %	711.506.950	100 %	1.971.520.150	100 %	2.267.248.173	100 %	2.607.335.398	100 %	2.998.435.708	100 %	3.448.201.064	100 %	14.004.247.443	Disbunak	Kab. Tanjab Barat
					Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG (Sumber Daya Genetik) hewan/tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	3 VUB	139.682.500	3 VUB	416.408.000	3 VUB	478.869.200	3 VUB	550.699.580	3 VUB	633.304.517	3 VUB	728.300.195	3 VUB	2.947.263.992	Disbunak	Kec. Betara, Kec. Pengabuan dan Kec. Tungkal Ilir
					Pemanfaatan SDG (Sumber Daya Genetik) hewan/tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	278.368.150	1 dokumen	1.114.238.300	1 dokumen	1.281.374.045	1 dokumen	1.473.580.152	1 dokumen	1.694.617.175	1 dokumen	1.948.809.751	6 dokumen	7.790.987.572	Disbunak	Desa Bunga Tanjung Kec. Betara, Desa Tanjung Paku Kec. Merlung dan Desa Terjun Gajah Kec. Betara
					Peningkatan Kualitas SDG (Sumber Daya Genetik) hewan/tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	293.456.300	1 dokumen	440.873.850	1 dokumen	507.004.928	1 dokumen	583.055.667	1 dokumen	670.514.017	1 dokumen	771.091.119	6 dokumen	3.265.995.880	Disbunak	Kab. Tanjab Barat
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.426 ekor	34 ekor	717.866.746	50 ekor dan 0,5 ton	3.808.991.605	800 ekor dan 0,8 ton	4.380.340.346	800 ekor dan 0,8 ton	5.037.391.398	800 ekor dan 0,8 ton	5.793.000.107	800 ekor dan 0,8 ton	6.661.950.123	3.284 ekor dan 3,7 ton	26.399.540.325	Disbunak	Kab. Tanjab Barat
					Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.426 ekor	34 ekor	717.866.746	50 ekor	3.706.371.605	800 ekor	4.262.327.346	800 ekor	4.901.676.448	800 ekor	5.636.927.915	800 ekor	6.482.467.102	3.284 ekor	25.707.637.161	Disbunak	Kab. Tanjab Barat

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	0.5 ton	102,620,000	0.8 ton	118,013,000	0.8 ton	135,714,950	0.8 ton	156,072,193	0.8 ton	179,483,021	3.7 ton	691,903,164	Disbunak	Kab. Tanjab Barat	
		22703	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya	20%	21%	354,234,000	22%	2,119,416,600	23%	2,160,637,250	24%	2,355,386,588	25%	2,572,881,013	26%	2,816,208,924	26%	12,378,764,375	Disbunak	Kab. Tanjab Barat
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunnya dokumen tanggul perkebunan di 7 (tujuh) di Kecamatan	1 dokumen	-	1 dokumen	158,550,000	1 dokumen	182,332,500	1 dokumen	209,682,375	1 dokumen	241,134,731	1 dokumen	277,304,941	1 dokumen	1,069,004,547	Disbunak	Kec. Pengabuan, Senyerang, Kuala Betara, Bram Itam, Seberang Kota dan Tungkal Ilir	
			Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 laporan	-	1 laporan	158,550,000	1 laporan	182,332,500	1 laporan	209,682,375	1 laporan	241,134,731	1 laporan	277,304,941	5 laporan	1,069,004,547	Disbunak	Kec. Tungkal Ilir, Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Pengabuan, Senyerang dan Kuala Betara	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Bertambahnya jumlah prasarana yang mendukung produktivitas sektor perkebunan/peternakan	58 unit	7 unit	354,234,000	14 unit	1,807,301,600	27 unit	1,801,705,000	27 unit	1,942,614,500	27 unit	2,098,193,112	27 unit	2,270,317,839	163 unit	10,274,366,051	Disbunak	Kab. Tanjab Barat
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	28 Unit	-	10 unit	299,950,000	10 unit	344,942,500	10 unit	389,785,000	10 unit	428,763,500	10 unit	493,078,025	50 unit	1,956,519,025	Disbunak	Kec. Bram Itam, Kuala Betara, Tungkal Ilir, Seb. Kota, Pengabuan	
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	1 unit	367,000,000	1 unit	422,050,000	1 unit	476,728,500	1 unit	528,762,552	1 unit	581,638,807	6 unit	2,376,179,859	Disbunak	Kec. Bram Itam, Kuala Betara, Tungkal Ilir, Seb. Kota, Pengabuan, Senyerang	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 unit	7 unit	354,234,000	3 unit	1,140,351,600	16 unit	1,034,712,500	16 unit	1,076,101,000	16 unit	1,140,667,060	16 unit	1,195,601,006	107 unit	5,941,667,166	Disbunak	Kab. Tanjab Barat
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah	5 laporan	-	1 laporan	153,565,000	1 laporan	176,599,750	1 laporan	203,089,713	1 laporan	233,553,169	1 laporan	268,586,145	5 laporan	1,035,393,777	Disbunak	Kab. Tanjab Barat	
			Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	5 laporan	-	1 laporan	153,565,000	1 laporan	176,599,750	1 laporan	203,089,713	1 laporan	233,553,169	1 laporan	268,586,145	5 laporan	1,035,393,777	Disbunak	Kab. Tanjab Barat	
		22704	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kematian Ternak	1.7%	1.7%	592,592,106	1.6%	823,833,899	1.5%	947,408,984	1.4%	1,089,520,331	1.3%	1,252,948,381	1.2%	1,440,890,638	1.2%	6,147,194,339	Disbunak	Kab. Tanjab Barat

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	9.000 ekor, 6.800 ekor, 5.000 ekor, 13.350	100%	592,592,106	100%	657,937,225	100%	756,627,809	100%	870,121,980	100%	1,000,640,277	100%	1,150,736,319	100%	5,028,655,717	Disbunak	
			Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 laporan	1 laporan	592,592,106	1 laporan	657,937,225	1 laporan	756,627,809	1 laporan	870,121,980	1 laporan	1,000,640,277	1 laporan	1,150,736,319	6 laporan	5,028,655,716	Disbunak	
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan	5 laporan	-	-	1 laporan	165,896,674	1 laporan	53,830,711	1 laporan	61,905,318	1 laporan	71,191,115	1 laporan	81,869,783	5 laporan	434,693,601	Disbunak	
			Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	5 laporan	-	-	1 laporan	165,896,674	1 laporan	53,830,711	1 laporan	61,905,318	1 laporan	71,191,115	1 laporan	81,869,783	5 laporan	434,693,601	Disbunak	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner	5 laporan	-	-	1 laporan	0	1 laporan	136,950,464	1 laporan	157,493,034	1 laporan	181,116,989	1 laporan	208,284,537	5 laporan	683,845,023	Disbunak	
			Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 laporan	-	-	-	0	1 laporan	136,950,464	1 laporan	157,493,034	1 laporan	181,116,989	1 laporan	208,284,537	5 laporan	683,845,023	Disbunak	
		2.21.06	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Angka Penanggulangan serangan OPT dan gangguan usaha perkebunan	100%	100%	304,886,622	100%	241,201,622	100%	277,381,865	100%	318,989,145	100%	366,837,517	100%	421,863,144	100%	1,931,159,915	Disbunak	Kab. Tanjung Jabung Barat
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendalinya OPT Tanaman Perkebunan dan Penanganan Kebakaran Lahan/Kebun Masyarakat	100 %	100 %	304,886,622	100 %	241,201,622	100 %	277,381,865	100 %	318,989,145	100 %	366,837,517	100 %	421,863,144	100 %	1,931,159,915	Disbunak	Kab. Tanjung Jabung Barat
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan yang Dikendalikan	1.000 ha	200 Ha	86,566,622	200 ha	100,776,622	200 ha	115,893,115	200 ha	133,277,083	200 ha	153,268,645	200 ha	176,258,941	1.200 Ha	766,041,028	Disbunak	Kab. Tanjung Jabung Barat
			Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	13 Kecamatan dan 5 Kali	30 Ha	133,825,000	30 Ha	140,425,000	30 Ha	161,488,750	30 Ha	185,712,063	30 Ha	213,568,872	30 Ha	245,604,203	180 Ha	1,080,623,887	Disbunak	Kab. Tanjung Jabung Barat
			Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	5 laporan	1 laporan	84,495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbunak	
		2.21.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan	4.796 Ha	350 STDB	154,649,874	750 STDB	500,112,259	750 STDB	675,129,098	750 STDB	661,398,463	750 STDB	760,608,232	750 STDB	874,699,467	4.100 STDB	3,526,597,393	Disbunak	Tanjung Jabung Barat
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya petani pekebun yang memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)	4.796 Ha	100%	154,649,874	100%	500,112,259	100%	675,129,098	100%	661,398,463	100%	760,608,232	100%	874,699,467	100%	3,526,597,393	Disbunak	Tanjung Jabung Barat
			Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 dokumen	1 dokumen	154,649,874	1 dokumen	500,112,259	1 dokumen	675,129,098	1 dokumen	661,398,463	1 dokumen	760,608,232	1 dokumen	874,699,467	6 dokumen	3,526,597,393	Disbunak	Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1032703	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Peternakan	100%	20%	320,768,571	25%	605,248,959	30%	696,036,303	35%	800,441,748	40%	920,508,011	45%	1,058,584,212	45%	4,401,587,804	Disbuk	Kab. Tanjab Barat
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas pengembangan kelembagaan serta penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluhan pertanian	35 unit	6 unit	320,768,571	12 unit	605,248,959	53 unit	696,036,303	53 unit	800,441,748	53 unit	920,508,011	53 unit	1,058,584,212	230 unit	4,401,587,804		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	30 unit	130,007,452	30 unit	149,508,572	30 unit	171,934,858	30 unit	197,725,086	120 unit	649,175,968		
			Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 unit	6 unit	320,768,571	11 unit	507,844,033	21 unit	476,655,125	21 unit	548,153,392	21 unit	630,376,401	21 unit	724,932,862	101 unit	3,208,730,384		Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 unit	-	-	1 unit	97,404,926	2 unit	89,373,726	2 unit	102,779,784	2 unit	118,196,752	2 unit	135,926,264	9 unit	543,681,452		Tanjung Jabung Barat
			Jumlah Anggaran				9,593,131,049	-	18,534,268,653	-	21,039,894,585	-	24,032,380,944	-	27,457,280,286	-	31,384,684,480	-	132,155,625,624		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan **Indikator Kinerja** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian **Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2021- 2026** sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian *tujuan* dan *sasaran RPJMD*.

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2021 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1. dibawah ini, yaitu :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021-2026
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020*)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)								
	Kelapa Sawit	119.346	121.136	123.074	125.166	127.419	129.840	132.437	132.437
	Karet	3.822	3.833	3.848	3.867	3.890	3.913	3.936	3.936
	Kelapa Dalam	54.667	55.050	55.490	55.989	56.549	57.171	57.800	57.800
	Kopi	1.185	1.189	1.194	1.200	1.207	1.215	1.224	1.224
	Pinang	10.463	10.557	10.663	10.780	10.909	11.039	11.182	11.182
	2. Jumlah Populasi Ternak (ekor)								

	Populasi Sapi (ekor)	8.908	9.086	9.267	9.452	9.641	9.833	10.029	10.029
	Populasi Kerbau (ekor)	729	744	758	773	788	803	819	819
	Populasi Kambing (ekor)	47.271	48.216	49.180	50.163	51.166	52.189	53.232	53.232
	Populasi Domba (ekor)	813	829	845	861	878	895	912	912
	Populasi Unggas (ekor)	1.464.111	1.493.393	1.523.260	1.553.725	1.584.799	1.616.494	1.648.823	1.648.823
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.58	69.60	69.80	69,90	70,10	70,20	70,30	70,30
	Nilai IKM Perangkat Daerah	80.20	80.25	80.30	80.35	80.40	80.45	80.50	80.50

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas yang memuat **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program** dan **Kegiatan** merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan. Dengan dijalankannya Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum OPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Rancangan Awal Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana - rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanung Jabung Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Fauziah, S.Pt

Pembina Tk. I

NIP. 19680205 199703 2 003